



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017

BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

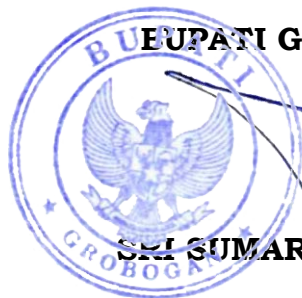
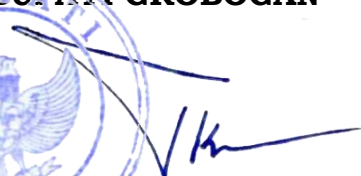
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan karunia-Nya, kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2017, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Laporan ini merupakan visualisasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang menggambarkan capaian hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021.

Kami menyadari bahwa kinerja dan akuntabilitas kinerja kami masih belum sempurna. Karena itu kritik, saran dan masukan semua pihak sangat diharapkan, demi perbaikan kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja kami ke depan. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama selama ini.

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan di masa yang akan datang.

Purwodadi, Maret 2018


BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, SH, MM



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2017, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, Maret 2018



INSPEKTUR KABUPATEN GROBOGAN

PUJI RAHARJO, SH, MM

NIP. 19621005 198903 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

PERNYATAAN TELAH DIREVIU..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Dasar Hukum 1

 B. Gambaran Kondisi Umum Daerah..... 1

 1. Kondisi Geografis 1

 2. Kondisi Demografi 4

 3. Pendidikan 9

 4. Kesejahteraan Sosial 11

 5. Kesehatan 13

 6. Kondisi Ekonomi 16

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 23

 A. Perencanaan Kinerja 23

 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 23

 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 32

 B. Perjanjian Kinerja..... 33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 43

 A. Capaian Kinerja Organisasi 43

 B. Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi..... 66

BAB IV PENUTUP 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN





DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah	2
Tabel I.2	Penggunaan Lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2017.....	3
Tabel I.3	Jumlah Penduduk Tahun 2013 sampai dengan 2017	5
Tabel I.4	Jumlah penduduk per kecamatan tahun 2017	5
Tabel I.5	Kepadatan Penduduk Tahun 2017	7
Tabel I.6	Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2017.....	8
Tabel I.7	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017	9
Tabel I.8	APM dan APK Tahun 2013-2017	10
Tabel I.9	Kondisi Prasarana Gedung Sekolah Tahun 2013-2017.....	11
Tabel I.10	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013-2017	11
Tabel I.11	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013-2017..	12
Tabel I.12	Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan Tahun 2013-2017.....	12
Tabel I.13	Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2017	13
Tabel I.14	Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Grobogan Tahun 2013 – 2017	13
Tabel I.15	Kinerja Produksi Pertanian Tahun 2013-2017	17
Tabel I.16	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2017.....	17
Tabel I.17	Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2013-2017 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010.....	18
Tabel I.18	Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Dasar Konstan Tahun 2010.....	19
Tabel I.19	Perkembangan Sektoral PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017	20
Tabel I.20	PDRB Per Kapita Tahun 2013-2017.....	21
Tabel I.21	Angka Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2017.....	22
Tabel II.1	Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021.....	25
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021.....	26
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2017.....	33



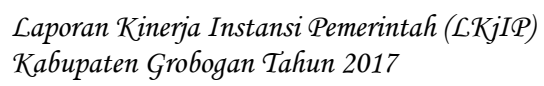
Tabel III.1	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Terhadap Target Tahun 2017	45
Tabel III.2	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya Presentase jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	50
Tabel III.3	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya Ketersediaan Drainase Perkotaan	50
Tabel III.4	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Berkurangnya Kawasan Kumuh dan Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi	51
Tabel III.5	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.4 Meningkatnya Fungsi Sarana Irigasi.....	51
Tabel III.6	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.5 Meningkatnya Sarana-Prasarana Perhubungan	51
Tabel III.7	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya Produksi Pertanian Pangan dan Hortikultura, perkebunan dan peternakan	52
Tabel III.8	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Meningkatnya produksi perikanan	52
Tabel III.9	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Meningkatnya Ketahanan Pangan	53
Tabel III.10	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM).....	53
Tabel III.11	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Meningkatnya Jumlah dan Kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta kualitas koperasi.....	53
Tabel III.12	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan	54
Tabel III.13	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.4 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor wisata dalam pembangunan daerah.....	54
Tabel III.14	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan	55
Tabel III.15	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Manajemen Pelayanan Pendidikan	55
Tabel III.16	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	55
Tabel III.17	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.4 Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat.....	56



Tabel III.18	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD	56
Tabel III.19	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.6 Terbangunnya Rumah Sakit Tipe C	56
Tabel III.20	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.7 Terciptanya Manajemen dan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Profesional di Puskesmas	57
Tabel III.21	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.8 Terkendalinya Jumlah Penduduk dan Meningkatnya Partisipasi Aktif KB.....	57
Tabel III.22	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.9 Meningkatnya Persentase Desa Memiliki BUMDesa	57
Tabel III.23	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.10 Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	58
Tabel III.24	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.11 Meningkatnya Prestasi Olah Raga.....	58
Tabel III.25	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.12 Berkurangnya Masyarakat yang Termasuk dalam PMKS	58
Tabel III.26	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal	59
Tabel III.27	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Pemberangkatan Transmigran.....	59
Tabel III.28	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.3 Menurunnya Pelanggaran Produk Hukum Daerah..	60
Tabel III.29	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya Kompetensi dan Kedisiplinan ASN ...	60
Tabel III.30	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah	61
Tabel III.31	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.3 Meningkatnya PAD dana Kualitas Pengelolaan Keudangan dan Aset Daerah	61
Tabel III.32	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.4 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik Pemda	62
Tabel III.33	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.5 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	62



Tabel III.34	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.6 Meningkatnya kualitas e-government, pengelolaan data/ informasi dan arsip daerah, serta pengamanan informasi sandi.....	62
Tabel III.35	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 7.1 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Berkurangnya Kasus Pencemaran Lingkungan	63
Tabel III.36	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 7.2 Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalinya Alih Fungsi Lahan..	63
Tabel III.37	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 7.3 Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan.....	64
Tabel III.38	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 8.1 Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan, Rasa Toleransi dan Kerukunan antar Umat Beragama ..	64
Tabel III.39	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 8.2 Lestarnya Budaya Lokal Masyarakat	64
Tabel III.40	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 9.1 Berkurangnya Kemiskinan, Kesenjangan antar Wilayah dan Kesenjangan antar Kelompok Pendapatan	65
Tabel III.41	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 9.2 Berkurangnya Ketimpangan Laki-Laki dan Perempuan dan Berkurangnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	65
Tabel III.42	Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Lokasi Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah ..	2
Gambar I.2	Piramida Penduduk Tahun 2017	9
Gambar I.3	Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk	10
Gambar I.4	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan	18
Gambar I.5	Grafik Perkembangan Pendapatan Per Kapita Tahun 2013-2016.....	21



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

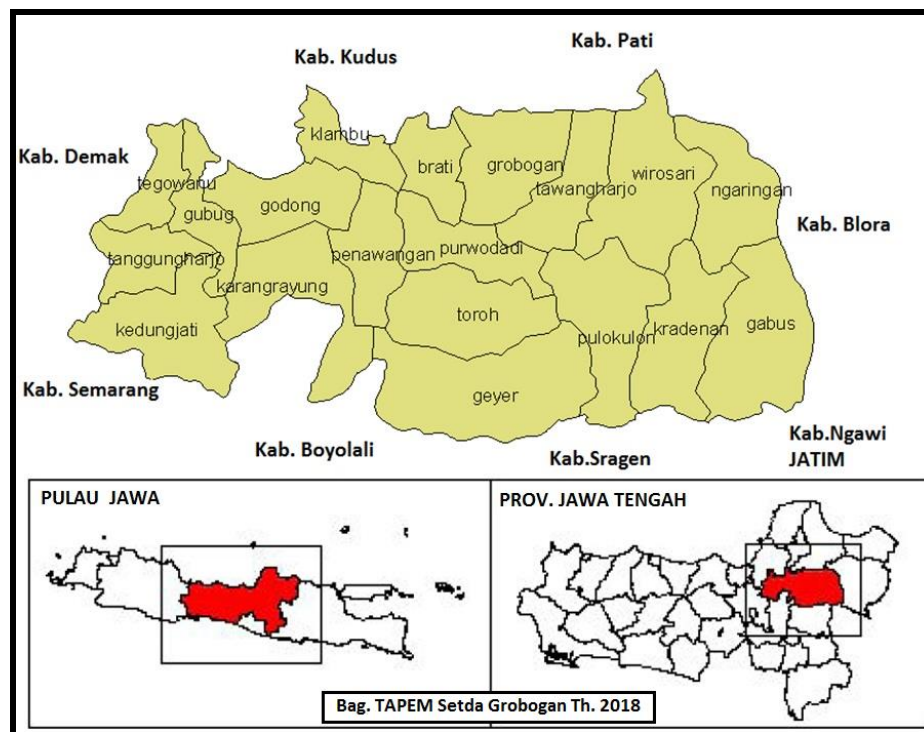
B. GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

a. Letak Geografi

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.



Gambar I. 1.
Peta Lokasi Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah

b. Luas Wilayah

Dengan luas wilayah kurang lebih 1.975,86 Km², membentang dari arah barat ke timur sepanjang $\pm$ 83 km dan dari utara ke selatan $\pm$ 37 km. Kabupaten Grobogan yang beribukota di Purwodadi merupakan kabupaten terluas ke-2 di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan, sebagaimana tampak dalam Tabel I.1 berikut :

Tabel I.1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/Lingk	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kedungjati	12	76	130,342
2	Karangrayung	19	100	140,595
3	Penawangan	20	71	74,177
4	Toroh	16	118	119,320
5	Geyer	13	102	196,192
6	Pulokulon	13	112	133,644
7	Kradenan	14	79	107,748
8	Gabus	14	87	165,365
9	Ngarangan	12	78	116,720
10	Wirosari	14	86	154,298
11	Tawangharjo	10	58	83,602



No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/Lingk	Luas Wilayah (Km ²)
12	Grobogan	12	52	104,556
13	Purwodadi	17	104	77,656
14	Brati	9	51	54,891
15	Klambu	9	44	46,562
16	Godong	28	86	86,780
17	Gubug	21	62	71,119
18	Tegowanu	18	54	51,670
19	Tanggunharjo	9	31	60,628
Jumlah		280	1.451	1.975,86

Sumber : BagianTata Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan.

c. Lahan Pertanian

Penggunaan lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan seluas 197.586 Ha terdiri dari lahan pertanian sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian, dengan perincian sebagaimana Tabel I.2 berikut :

Tabel I.2
Penggunaan Lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2017

No	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah (Ha)		Lahan Pertanian Bukan Sawah (Ha)		Lahan Bukan Pertanian (Ha)	Jumlah (Ha)
		Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Tegal/Kebun	Lainnya		
1	Kedungjati	224,000	555,051	1.849,949	10.023,000	382,000	13.034,000
2	Karangrayung	1.618,757	2.599,072	1.467,171	5.907,000	2.467,000	14.059,000
3	Penawangan	4.217,000	599,784	247,216	1.434,000	920,000	7.418,000
4	Toroh	2.613,070	2.849,629	734,301	3.411,000	2.323,000	11.931,000
5	Geyer	41,000	3.301,036	1.406,964	14.036,000	834,000	19.619,000
6	Pulokulon	-	6.917,328	150,672	3.603,000	2.694,000	13.365,000
7	Kradenan	596,000	4.751,460	11,460	2.871,000	2.567,000	10.774,000
8	Gabus	-	5.725,207	194,793	8.392,000	2.225,000	16.537,000
9	Ngaringan	1.693,000	4.374,438	770,562	2.199,000	2.635,000	11.672,000
10	Wirosari	506,000	5.365,746	1.630,254	5.883,000	2.045,000	15.430,000
11	Tawangharjo	-	3.590,763	865,237	3.028,000	876,000	8.360,000
12	Grobogan	120,000	3.650,785	559,215	4.102,000	2.024,000	10.456,000
13	Purwodadi	3.185,000	1.758,451	281,549	12,000	2.528,000	7.765,000



No	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah (Ha)		Lahan Pertanian Bukan Sawah (Ha)		Lahan Bukan Pertanian (Ha)	Jumlah (Ha)
		Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Tegal/Kebun	Lainnya		
14	Brati	1.034,830	1.500,321	589,849	1.186,000	1.179,000	5.490,000
15	Klambu	2.415,642	-	311,358	1.153,000	776,000	4.656,000
16	Godong	5170,000	1.552,379	257,621	181,000	1.518,000	8.679,000
17	Gubug	4059,130	-	-	1.132,870	1.919,000	7.111,000
18	Tegowanu	3214,000	879,599	290,401	-	783,000	5.167,000
19	Tanggunharjo	709,000	1.369,154	98,846	2.853,000	1.033,000	6.063,000
	JUMLAH	31.416,429	51.340,203	11.694,498	71.406,870	31.728,000	197.586,000

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

d. Keadaan Alam

Kabupaten Grobogan di bagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

- Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut rata-rata (*mean sea level*) dengan kemiringan antara 0 – 8⁰. Dataran ini, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.
- Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 8-15⁰ dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.
- Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah di atas 15⁰, meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2017 tercatat sebesar 1.449.791 jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk 0,39% atau bertambah 5.589 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2016. Data jumlah penduduk ini adalah data yang sudah



disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2014, Nomor 470/328/SJ, perihal Pemanfaatan Data Kependudukan, yang mewajibkan data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.

Data jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel I.3 berikut:

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Tahun 2013 sampai dengan 2017

NO.	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERUBAHAN	PERTUMBUHAN	KET
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN				
1	2013	705.352	697.408	1.402.760	8.591	0,60	
2	2014	713.077	699.248	1.412.325	9.565	0,68	
3	2015	718.225	713.310	1.431.535	19.210	1,36	
4	2016	727.127	717.075	1.444.202	12.667	0,89	
5	2017	729.738	720.053	1.449.791	5.589	0,39	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan.

b. Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Sex Rasio

Jika dilihat dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak **729.738** jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak **720.053** jiwa, maka sex rasio penduduk mencapai 101%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel I.4 berikut :

Tabel I.4
Jumlah Penduduk per kecamatan tahun 2017

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			RASIO JENIS KELAMIN
		L	P	TOTAL	
1	Kedungjati	22.466	22.431	44.897	100
2	Karangrayung	49.988	49.000	98.988	102
3	Penawangan	31.959	31.737	63.696	101
4	Toroh	57.950	57.994	115.944	100



No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			RASIO JENIS KELAMIN
		L	P	TOTAL	
5	Geyer	33.688	33.504	67.192	101
6	Pulokulon	54.760	53.662	108.422	102
7	Kradenan	41.671	41.073	82.744	101
8	Gabus	37.576	37.062	74.638	101
9	Ngaringan	35.368	34.131	69.499	104
10	Wirosari	47.144	46.598	93.742	101
11	Tawangharjo	29.527	28.660	58.187	103
12	Grobogan	39.271	38.295	77.566	103
13	Purwodadi	69.215	68.988	138.203	100
14	Brati	25.300	24.552	49.852	103
15	Klambu	19.250	18.645	37.895	103
16	Godong	42.610	42.548	85.158	100
17	Gubug	42.341	41.956	84.297	101
18	Tegowanu	28.438	28.044	56.482	101
19	Tanggungharjo	21.216	21.173	42.389	100
	JUMLAH	729.738	720.053	1.449.791	101

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan.

c. **Kepadatan Penduduk Per Kecamatan**

Sementara itu jika dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 138.203 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 37.895 jiwa.

Dari aspek **Kepadatan Penduduk** tercatat sebesar 734 jiwa/km², dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.780 jiwa/km² dan kecamatan kepadatan terendah di Kecamatan Geyer yaitu sebesar 342 jiwa/km².

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat dalam Tabel I.5 di bawah ini :



Tabel I.5
Kepadatan Penduduk Tahun 2017

NO	KECAMATAN	LUAS WIL KM2	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN JIWA/KM2
1	Kedungjati	130,342	44.897	344
2	Karangrayung	140,595	98.988	704
3	Penawangan	74,177	63.696	859
4	Toroh	119,320	115.944	972
5	Geyer	196,192	67.192	342
6	Pulokulon	133,644	108.422	811
7	Kradenan	107,748	82.744	768
8	Gabus	165,365	74.638	451
9	Ngaringan	116,720	69.499	595
10	Wirosari	154,298	93.742	608
11	Tawangharjo	83,602	58.187	696
12	Grobogan	104,556	77.566	742
13	Purwodadi	77,656	138.203	1.780
14	Brati	54,891	49.852	908
15	Klambu	46,562	37.895	814
16	Godong	86,780	85.158	981
17	Gubug	71,119	84.297	1.185
18	Tegowanu	51,670	56.482	1.093
19	Tanggunharjo	60,628	42.389	699
	JUMLAH	1.975,865	1.449.791	734

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan.

d. Struktur Usia dan Angka Ketergantungan Penduduk

Untuk mengetahui angka ketergantungan, harus disusun terlebih dahulu struktur usia penduduk dan piramida penduduk, karena Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (disebut usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif).

Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:



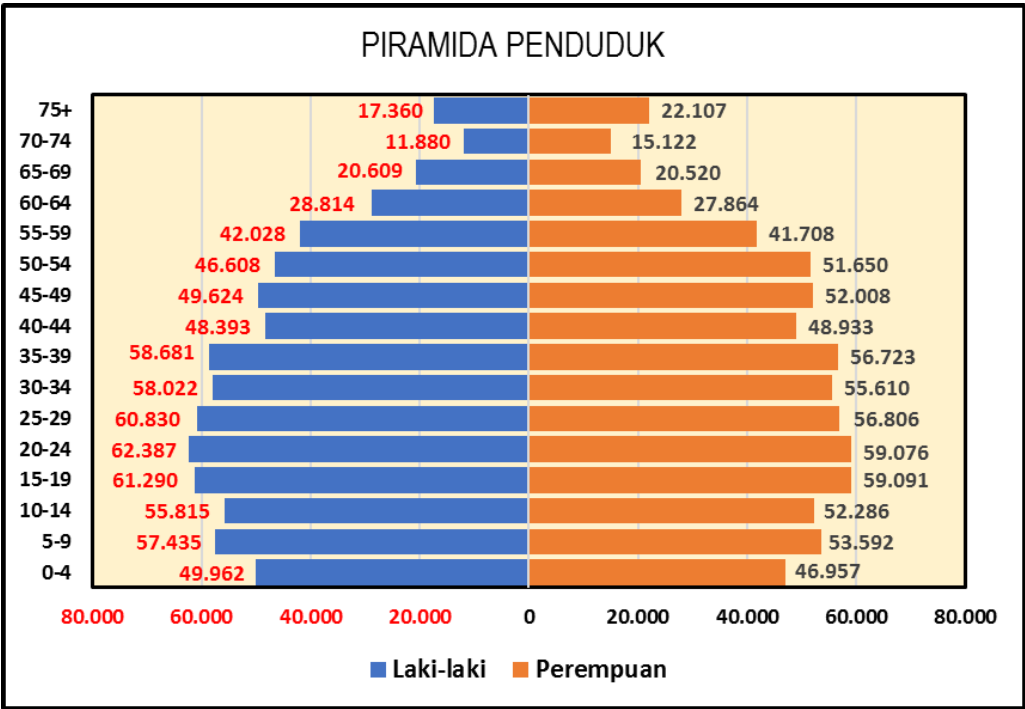
Tabel I. 6
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2017

No.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
1	0-4	49.962	46.957	96.919
2	5-9	57.435	53.592	111.027
3	10-14	55.815	52.286	108.101
4	15-19	61.290	59.091	120.381
5	20-24	62.387	59.076	121.463
6	25-29	60.830	56.806	117.636
7	30-34	58.022	55.610	113.632
8	35-39	58.681	56.723	115.404
9	40-44	48.393	48.933	97.326
10	45-49	49.624	52.008	101.632
11	50-54	46.608	51.650	98.258
12	55-59	42.028	41.708	83.736
13	60-64	28.814	27.864	56.678
14	65-69	20.609	20.520	41.129
15	70-74	11.880	15.122	27.002
16	75 +	17.360	22.107	39.467
TOTAL		729.738	720.053	1.449.791

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan.

Pada tahun 2017 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 1.026.146 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 423.645 jiwa, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 41%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 41 orang yang non produktif.

Dari data di atas dapat disusun dalam bentuk grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana tampak dalam Gambar I.2 sebagai berikut :



Gambar. I.2
Piramida Penduduk Tahun 2017

3. Pendidikan

Kondisi pendidikan penduduk dapat dilihat dalam tabel jumlah penduduk menurut pendidikan tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel I.7
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

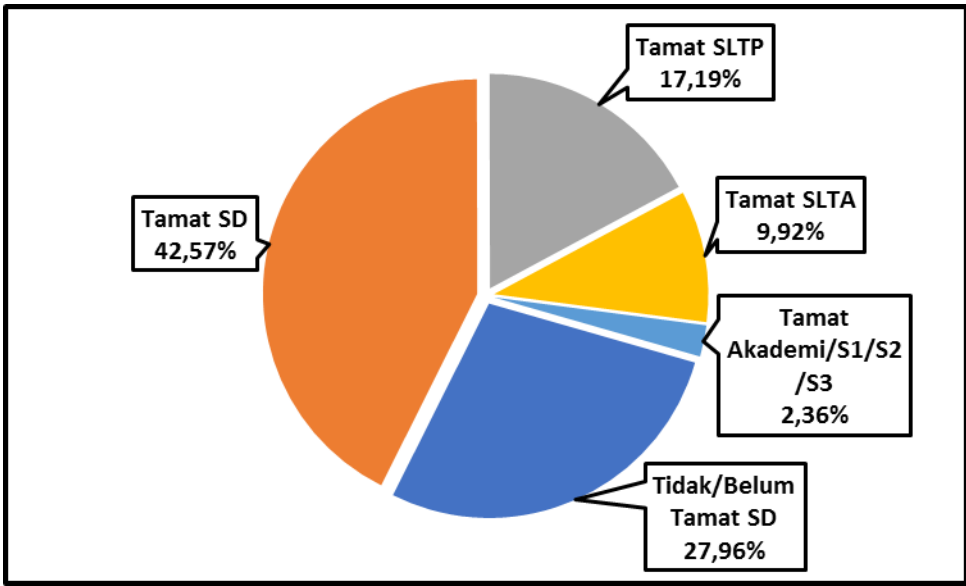
No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak/Belum Tamat SD	405.351
2	Tamat SD	617.115
3	Tamat SLTP	249.235
4	Tamat SLTA	143.890
5	Tamat Akademi , S1, S2, S3	34.200
	TOTAL	1.449.791

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan.

Dari data di atas, komposisi tingkat pendidikan penduduk, tertinggi ditempati kategori tamatan SD atau sederajat sebanyak 42,57%, kemudian secara berurutan diikuti tidak atau belum tamat SD sebanyak 27,96%, tamatan SLTP atau sederajat 17,19%, tamatan SLTA atau sederajat 9,92%, dan terakhir tamatan Diploma, S1, S2, dan S3 sebanyak 2,36%.



Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditunjukkan dalam gambar I.3 berikut:



Gambar I.3
Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk

Untuk mengetahui kinerja bidang pendidikan dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel I.8 berikut:

Tabel I.8
APK dan APM Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikatorif				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	APK SD	115,41	112,06	106,65	107,79	103,77
2.	APM SD	95,15	96,56	97,69	98,79	88,99
3.	APK SLTP	99,46	107,09	100,03	102,27	100,04
4.	APM SLTP	80,74	84,05	87,06	74,56	68,80
5.	APK SLTA	56,70	63,79	67,35	68,28	60,68
6.	APM SLTA	33,93	41,02	51,72	52,59	44,69

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Usia sekolah SD : 7-12 tahun, SLTP : 13-15 tahun, SLTA : 16-18 tahun.

Dari tabel I.9 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017, nilai APM SD sebesar 88,99. Ini mengandung makna bahwa sebanyak 88,99 persen anak umur 7 sampai 12 tahun di Kabupaten Grobogan sedang memperoleh pendidikan di tingkat SD.
2. Nilai APM SLTP sebesar 68,80, artinya sebanyak 68,80 persen anak usia 13-15 tahun sedang mengenyam pendidikan SLTP.



3. Nilai APM SLTA sebesar 44,69 artinya sebanyak 44,69 persen anak 16-18 tahun sedang melangsungkan pendidikan di tingkat SLTA.

Selanjutnya kondisi prasarana pendidikan gedung sekolah, dapat dilihat dalam tabel I.9 sebagai berikut :

Tabel I.9
Kondisi Prasarana Gedung Sekolah tahun 2013-2017

NO	TAHUN	SD			SLTP		
		RB	RR	B	RB	RR	B
1	2013	1.466	1.276	2.546	109	261	1.557
2	2014	683	2.931	1.269	200	958	446
3	2015	291	2.790	1.205	156	915	362
4	2016	943	2.959	1.173	148	1.048	322
5	2017	414	3.107	1.181	96	1.052	356

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

RB: Rusak Berat, RR : Rusak Ringan, B : Bagus

4. Kesejahteraan Sosial

a. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Di Kabupaten Grobogan, berdasarkan data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan, mulai dari 14,87% pada tahun 2013 dan berurutan mengalami penurunan menjadi 13,86% pada tahun 2014, 13,68% pada tahun 2015, 13,57% pada tahun 2016 dan pada akhir tahun 2017 sebesar 13,13%. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel I.10 sebagai berikut :

Tabel I.10
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk Miskin %	14,87	13,86	13,68	13,57	13,13

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan.

b. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (aritmatik) dari indeks kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), indeks pengetahuan (angka harapan lama sekolah dan



rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (pengeluaran per kapita). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I.11
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013 – 2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017*)
Nilai IPM Kabupaten	67,43	67,77	68,05	68,52	-
Nilai IPM Provinsi	68,02	68,78	69,49	69,98	-
Peringkat Kabupaten Dalam Provinsi	19	19	21	22	-

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2017 belum tersedia).

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 adalah sebesar 68,52. Angka ini termasuk dalam kelas pembangunan manusia kategori SEDANG. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM pada tahun-tahun sebelumnya, IPM di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan

Upaya meningkatkan mutu pelayanan kehidupan beragama telah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana keagamaan berupa rumah ibadah. Berikut ini data prasarana ibadah dan sosial keagamaan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2013 sampai tahun 2017, sebagaimana Tabel I.12 berikut:

Tabel I.12
Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan Tahun 2013-2017

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Masjid	1.345	1.345	1.345	1.345	1.395
2	Musholla/Langgar/Surau	6.320	6.320	6.320	6.320	5.636
3	Gereja	111	111	111	111	86
4	Pura/Kuil/Vihara	18	18	18	18	10
5	Panti Sosial Asuhan Anak	28	28	28	28	28
6	Panti Sosial Tresna Werda	1	1	1	1	1



No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
7	Panti Orang Gila	1	1	1	1	1
8	Panti Persinggahan	1	1	1	1	1
9	Panti Cacat	1	1	1	1	1

Sumber data : Bagian Kesra Setda Kabupaten Grobogan

5. Kesehatan

Perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Grobogan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan menyeluruh yang dekat dengan masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tahun 2017 secara rinci seperti pada tabel 1.13 berikut :

Tabel I.13
Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2017

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Rumah Sakit	7	7	-	-
2.	Puskesmas	30	26	4	-
3.	Puskesmas Pembantu	69	36	22	11
4.	Klinik	42	42	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

Adapun indikator keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diukur dengan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Prevalensi Gizi Buruk Balita. Perkembangan AKB, AKI, AKABA, dan prevalensi gizi buruk pada balita tahun 2013 sampai tahun 2017 seperti pada tabel 1.14 berikut :

Tabel I.14
Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Balita dan Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Grobogan Tahun 2013 – 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikatif				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	AKB/1000 KH	14,14	17,82	17,44	17,22	13,83
2.	AKI/100.000 KH	101,10	188,69	149,92	127,19	55,68



3.	AKABA/1000 KH	15,72	19,53	18,99	20,17	15,78
4.	PREVALENSI GIZI BURUK BALITA	0,05	0,06	0,05	0,03	0,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan banyaknya kematian bayi umur kurang dari 1 tahun (0–11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan tabel I.15, AKB di Kabupaten Grobogan tahun 2017 sebesar 13,83/1.000 kelahiran hidup (KH) dan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 17,22/1.000 KH, AKB mengalami penurunan. Secara nasional sesuai target sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan Kementerian Kesehatan yaitu 24 per 1.000 KH, AKB di Kabupaten Grobogan masih di bawah angka tersebut. Walaupun telah menunjukkan penurunan, namun bila dibandingkan dengan Indikator Rencana Aksi Daerah *Millenium Development Goals* (RAD MDGs) Provinsi Jawa Tengah yang ditargetkan sebesar 9,1/1.000 KH, Kabupaten Grobogan belum dapat mencapai target tersebut.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung semasa kehamilan, persalinan dan masa nifas yang mempunyai manfaat sebagai gambaran risiko dihadapi oleh ibu selama kehamilan dan melahirkan. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetrik.

Kematian ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola) dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi. Angka kematian ibu di Kabupaten Grobogan tahun 2017 sebesar 55,68/100.000 kelahiran hidup (KH) dan bila dibandingkan tahun 2016 sebesar



127,19/100.000 KH, angka tersebut menunjukkan penurunan. Apabila dibandingkan dengan target MDGs sebesar 102 per 100.000 dan target Provinsi Jawa Tengah sebesar 60/100.000 KH, Kabupaten Grobogan telah dapat mencapai target tersebut.

c. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah kematian anak balita (12 – 59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita mempunyai manfaat untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA, tingkat keberhasilan program KIA dan menilai kondisi sanitasi lingkungan.

Angka kematian balita di Kabupaten Grobogan tahun 2017 sebesar 15,78/1.000 KH, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 20,17/1.000 KH. Selanjutnya bila dibandingkan dengan target MDGs yaitu 32 per 1.000 kelahiran hidup, AKABA di Kabupaten Grobogan masih sesuai target, namun bila dibandingkan RAD MDGs Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,01/1.000 KH, RAD MDGs Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan belum dapat mencapai target tersebut.

Permasalahan AKI, AKB dan AKABA di Kabupaten Grobogan memerlukan usaha keras dan dukungan semua pihak untuk menurunkannya. Upaya yang sudah dilaksanakan antara lain :

- 1). Kebijakan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sebagai upaya menjamin persalinan dikelola oleh tenaga kesehatan yang terampil dan kompeten dengan ditunjang sarana prasarana yang memadai termasuk kesiapan sistem rujukan.
- 2). Pemantauan kinerja klinis untuk pelayanan ibu dan bayi baru lahir pada 10 Puskesmas dengan dukungan Program *Expanding Maternal and Neonatal Survival* (EMAS) untuk memotivasi agar peralatan dan pelayanan yang diberikan sesuai standar.
- 3). *Short Massage Service* (SMS) Bunda, yaitu layanan SMS ke Nomor 08118469468 yang secara berkala memberikan pesan kepada ibu dan keluarganya tentang kehamilan dan pasca persalinan serta bayi dan anak umur usia 2 tahun.
- 4). Menambah bidan baru untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kebidanan khususnya pada desa yang sulit akses pelayanan kesehatannya.



- 5). Meningkatkan ketrampilan teknis kebidanan dan bayi baru lahir bagi dokter pada 30 Puskesmas dan dokter fasilitas pelayanan kebidanan swasta dengan mendapat dukungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Grobogan.
- 6). Meningkatkan ketrampilan bidan dalam pelayanan kebidanan dan neonatus yang didukung oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Grobogan dan IDI.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dan telah menunjukkan hasilnya ini akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

d. Gizi Buruk

Pendataan gizi kurang dan gizi buruk didasarkan pada 2 kategori, kategori pertama membandingkan berat badan dengan umurnya (BB/U) dan kategori kedua membandingkan berat badan dengan tinggi badannya (BB/TB).

Skrining pertama dilakukan di Posyandu dengan kategori pertama yaitu membandingkan berat badan dengan umurnya melalui kegiatan penimbangan. Jika ditemukan kasus gizi kurang/buruk dilakukan perawatan gizi kurang/buruk sesuai pedoman di Posyandu dan Puskesmas, dilanjutkan dengan skrining berikutnya yaitu dengan membandingkan berat badan dengan tinggi badannya, jika ternyata menderita gizi buruk maka dilakukan perawatan sesuai standar sampai di Rumah Sakit.

Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 sebesar 0,01%, bila dibandingkan dengan RAD MDGs sebesar < 5% masih sesuai target.

6. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Daerah

Produk unggulan adalah produk yang mempunyai keunggulan dari segi produksi, kontinuitas dan daya saing sehingga diterima oleh masyarakat dan menarik investor. Sesuai kondisi geografis/potensi wilayah yang ada, produk dari sektor pertanian di Kabupaten Grobogan masih menjadi potensi daerah yang paling utama.

Kondisi produk pertanian yang ada di Kabupaten Grobogan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel I.15 :



Tabel I.15
Kinerja Produksi Pertanian Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Jumlah				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi padi sawah	Ton	622.715	555.784	786.040	788.435,7	848.348
2.	Luas panen padi sawah	Ha	109.498	107.455	123.446	127.488,9	135.532,3
3.	Produksi padi gogo	Ton	20.603	24.488	13.267	15.617,3	16.003
4.	Luas panen padi gogo	Ha	4.222	5.982	3.489	3.443	3.583
5.	Produksi jagung	Ton	588.997	595.366	700.941	751.862,7	601.507
6.	Luas panen jagung	Ha	98.908	106.122	112.700	118.092,2	126.457,5
7.	Produksi kedelai	Ton	32.314	50.582	48.003	48.316	37.185
8.	Luas panen kedelai	Ton	14.615	22.619	17.869	20.528,1	19.265,3
9.	Jumlah kelompok tani	Poktan	1.671	1.671	1.600	1.600	1600
10.	Jumlah penggilingan padi	Unit	1.04	1.086	1.086	1.086	1.086

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Selain produk unggulan Kabupaten Grobogan juga memiliki produk andalan yaitu produk yang dapat diandalkan oleh suatu daerah karena banyak diusahakan oleh masyarakat setempat dan mempunyai prospek pasar yang cerah, diantaranya adalah : sapi bibit, sale pisang, melon merah, kecap, paha katak, sarang burung walet dan kerajinan alat pertanian.

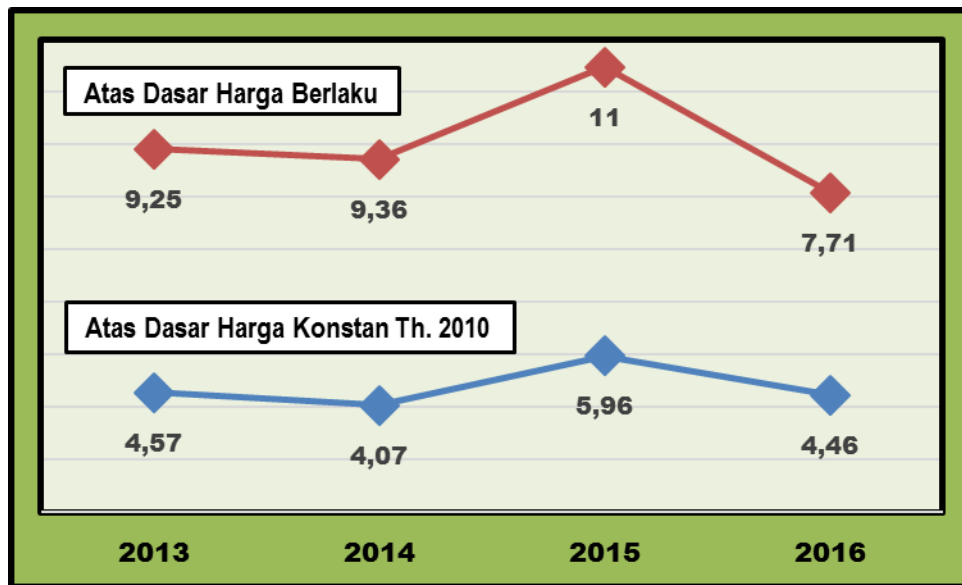
b. Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2016 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2016 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan PDRB dalam Tabel I.16 dan Gambar I.4 sebagai berikut :

Tabel I.16
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2017

PDRB	2013	2014	2015	2016	2017*)
Atas Dasar Harga Berlaku	9,25	9,36	11,00	7,71	-
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	4,57	4,07	5,96	4,46	-

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2017 belum tersedia).



Gambar. I.4
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan

c. Pertumbuhan Sektoral terhadap PDRB

Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2013 sampai dengan 2017 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel I.17 sebagai berikut :

Tabel I.17
Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,78	-1,08	8,34	2,34	-
2	Pertambangan dan Penggalian	8,00	5,03	1,06	2,24	-
3	Industri Pengolahan	7,79	10,47	4,94	5,03	-
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,90	6,36	3,27	5,16	-
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,21	4,65	1,81	1,44	-
6	Konstruksi	6,59	5,07	4,63	5,59	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,48	4,39	3,41	4,80	-
8	Transportasi dan Pergudangan	7,49	7,69	6,38	7,51	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,89	6,44	6,50	4,44	-
10	Informasi dan Komunikasi	7,75	10,19	8,83	6,84	-
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,39	7,29	7,30	7,85	-
12	Real Estate	9,13	5,80	6,15	5,93	-



No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
13	Jasa Perusahaan	7,24	5,86	8,21	6,80	-
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,96	1,14	4,95	2,91	-
15	Jasa Pendidikan	7,99	7,89	6,74	5,73	-
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,68	5,48	6,27	5,87	-
17	Jasa lainnya	7,49	8,08	3,16	6,50	-
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,57	4,07	5,96	4,46	-

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2017 belum tersedia).

d. Perkembangan PDRB

Secara sektoral, perkembangan PDRB Atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel I.18 dan I.19 sebagai berikut :

Tabel I.18
Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.499.335,70	4.450.901,85	4.821.978,84	4.934.935,35	-
2	Pertambangan dan Penggalian	167.384,78	175.799,50	177.664,97	181.647,14	-
3	Industri Pengolahan	1.542.864,73	1.704.382,60	1.788.551,74	1.878.584,69	-
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14.813,60	15.756,19	16.271,55	17.111,62	-
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.032,63	7.359,51	7.492,64	7.600,87	-
6	Konstruksi	804.908,83	845.723,83	884.916,03	934.380,36	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.141.785,87	3.279.558,53	3.391.377,48	3.554.133,52	-
8	Transportasi dan Pergudangan	709.686,48	764.286,68	813.078,16	874.144,68	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	626.623,07	666.959,99	710.334,81	741.851,17	-
10	Informasi dan Komunikasi	375.216,21	413.465,48	449.960,76	480.749,03	-
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	536.722,88	575.852,05	617.903,50	666.398,04	-
12	Real Estate	337.597,87	357.185,23	379.163,16	401.661,56	-
13	Jasa Perusahaan	34.694,86	36.727,67	39.741,21	42.444,56	-
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	522.630,87	528.582,22	554.725,40	570.846,43	-
15	Jasa Pendidikan	618.423,66	667.206,72	712.160,40	752.987,48	-
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135.033,46	142.437,11	151.367,30	160.254,70	-



17	Jasa lainnya	399.973,44	432.271,50	445.931,47	474.898,51	-
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	14.474.728,93	15.064.456,66	15.962.619,43	16.674.629,70	-

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2017 belum tersedia).

Tabel I.19
Perkembangan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2013-2017

No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.446.273,45	5.693.216,30	6.613.771,43	6.907.435,71	-
2	Pertambangan dan Penggalian	184.416,99	219.953,99	255.166,80	270.819,52	-
3	Industri Pengolahan	1.786.542,88	2.107.877,00	2.332.599,80	2.563.011,61	-
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13.999,57	15.368,96	16.657,77	18.989,69	-
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.981,08	8.855,54	9.284,61	9.663,56	-
6	Konstruksi	911.045,21	1.031.137,08	1.126.352,07	1.211.650,02	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.408.388,66	3.658.079,36	3.853.999,22	4.209.437,13	-
8	Transportasi dan Pergudangan	722.432,16	828.084,18	918.016,49	988.582,97	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	706.464,56	794.495,97	889.231,96	983.202,52	-
10	Informasi dan Komunikasi	363.504,00	390.624,57	417.433,51	449.855,95	-
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	647.811,84	730.911,52	818.900,12	913.831,17	-
12	Real Estate	350.127,31	386.123,88	423.519,37	459.217,05	-
13	Jasa Perusahaan	40.042,98	43.866,06	49.872,70	55.698,74	-
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	615.639,31	662.106,08	722.062,74	784.646,45	-
15	Jasa Pendidikan	826.958,17	933.716,22	1.008.555,68	1.106.669,68	-
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	164.640,77	181.371,78	199.562,01	213.933,61	-
17	Jasa lainnya	430.067,33	496.047,15	527.102,92	590.671,91	-
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	16.626.336,25	18.181.835,66	20.182.089,20	21.737.317,31	-

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2017 belum tersedia).

e. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan melihat PDRB per kapita Kabupaten Grobogan, maka akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Grobogan tahun 2016 mengalami kenaikan, baik dihitung



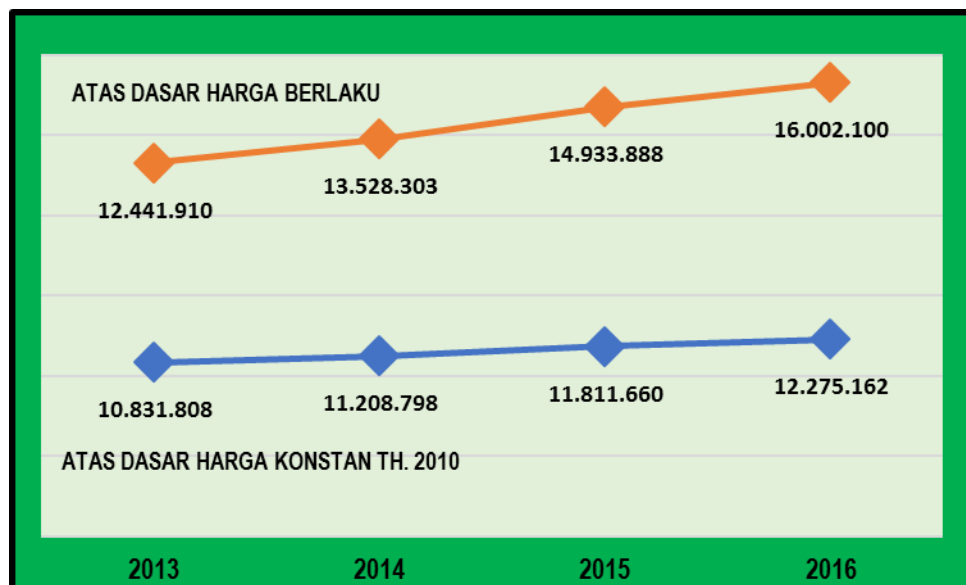
atas dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel I.20 sebagai berikut :

Tabel I. 20
PDRB Per Kapita Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah penduduk Hasil Proyeksi	PDRB (Juta Rp.)		PDRB Perkapita (Rp.)	
			harga berlaku	harga konstan 2010	harga berlaku	harga konstan 2010
1	2	3	4	5	6	7
1	2013	1.336.317	16.626.336,25	14.474.728,93	12.441.910	10.831.808
2	2014	1.343.985	18.181.835,66	15.064.456,66	13.528.303	11.208.798
3	2015	1.351.429	20.182.089,21	15.962.619,43	14.933.888	11.811.660
4	2016	1.358.404	21.737.317,31	16.674.629,70	16.002.100	12.275.162
5	2017*)	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2017 belum tersedia).

Sesuai tabel di atas terlihat data pertumbuhan PDRB perkapita Tahun 2016 atas dasar Harga Konstan sebesar Rp.12.275.162,- atau naik 3,92% dari tahun sebelumnya. Sedangkan atas dasar harga berlaku sebesar Rp.16.002.100,- atau naik sebesar 7,15%. Pergerakan kenaikan pendapatan per kapita ini dapat dilihat pada gambar I.5 sebagai berikut :



Gambar I.5
Grafik Perkembangan Pendapatan Per Kapita Tahun 2013-2016



f. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi yang terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 2,41 sedangkan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,03. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah, sebagai berikut :

Tabel I.21
Angka Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi	7,88	8,03	3,31	2,41	4,05

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA.

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pilkada. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera
Secara Utuh dan Menyeluruh”***

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu masyarakat Kabupaten Grobogan yang **sejahtera secara utuh** dan masyarakat Kabupaten Grobogan yang **sejahtera secara menyeluruh**. Maka penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah :

1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat secara utuh unsur yang ada dalam arti sejahtera terpenuhi semua, baik itu sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya, terhindar dari ancaman keamanan dan ketertiban lingkungan.



2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandai dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayah.

5.1. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”**, ditetapkan 9 (sembilan) misi yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat , keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat



9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan

5.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2016-2021. Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran Pokok Pembangunan yang akan dicapai Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.1
Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2017	Kondisi Akhir
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,96	6,26	6,86
2.	Laju Inflasi	%	3,31	3,11	2,71
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,05	68,67	69,91
4.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	85,44 (2014)	86,05	86,85
5.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	56,95 (2014)	57,85	58,93



Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran per Misi Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Pencapaian
Misi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016- 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2017	Kondisi Akhir
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta sarana drainase perkotaan	Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	1. Persentase jalan - jembatan dalam kondisi baik	%	40,69	52,94	84,51
	Meningkatnya ketersediaan drainase perkotaan	2. Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.	% penduduk	34	42	58
Meningkatkan pemenuhan akses permukiman, air minum dan sanitasi yang layak.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	3. Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas kawasan kumuh yang ditetapkan SK Bupati.	%	0,054	0,036	0,000
			Ha	77,32	37,32	0
		4. Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	70,00	80,00	100
		5. Persentase cakupan pelayanan air minum	%	45,7	51	63
Meningkatkan pemenuhan air irigasi untuk pertanian	Meningkatnya fungsi sarana irigasi	6. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	82	83,1	85
Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana transportasi yang aman dan nyaman	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	7. Rasio ijin trayek	Ratio	0,019	0,021	0,023
		8. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	92	93	95



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2017	Kondisi Akhir
Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan darat	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	9. Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura	%	11,90	14,39	23,51
		10. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/th	3.4	3	3
		11. Pertumbuhan produksi peternakan	%	9,3	10,09	11,11
	Meningkatnya produksi perikanan	12. Produksi perikanan Budidaya per tahun	kg	1.890.990	2.094.756	2.587.662
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan	13. Skor PPH	Skor	85	87	90
		14. Ketersediaan cadangan pangan daerah	%	79,98	84	92
Menumbuhkembangkan usaha ekonomi kerakyatan baik koperasi dan UMKM, industri, maupun perdagangan	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)	15. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,70	3,10	3,46
		16. Pertumbuhan Industri	%	1,27	1,29	1,35
	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta kualitas koperasi	17. Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	73,71	97	90,5
		18. % UKM yang mampu mengakses permodalan	%	90	90	94
		19. Persentase koperasi aktif	%	88	89,20	93,22
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan	20. Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	43,75	44	68
		21. Perkembangan nilai ekspor	Rp	142.032.319.000	142.742.480.000	145.618.813.000
Mengembangkan pariwisata daerah yang berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor wisata dalam pembangunan daerah	22. Kunjungan wisata	%	206.896	210.000	375.000
		23. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,76	0,81	0,93
Membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh	24. Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	6,91	6,93	7,04
		25. Angka Harapan lama sekolah	Tahun	12,25	12,44	12,82



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2017	Kondisi Akhir
	pendidikan					
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan manajemen pelayanan pendidikan	26. Angka kelulusan SD/MI	%	100	100	100
		27. Angka kelulusan SMP/MTS	%	100	100	100
		28. Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	87,5	87,59	87,72
		29. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,95	92,99	93,13
	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	30. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun	Orang	20.250	23.000	146.000
Meningkatkan derajat kesehatan kesehatan yang semakin berkualitas dan merata	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	31. Angka usia harapan hidup	Tahun	73,88	74,12	74,44
		32. Angka Kematian Ibu	Kasus	33	29	25
		33. Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	17,44	13,5	9,5
		34. Persentase balita gizi buruk	%	0,055	0,04	0,01
	Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD	35. Tingkatan Akreditasi RS oleh KARS versi 2012	0	Lulus Tk. Lanjut 12 Pelayanan	Lulus Paripurna (versi 2012)	Lulus Paripurna (versi 2012)
	Terbangunnya rumah sakit tipe C	36. Jumlah Rumah Sakit Tipe C yang dibangun	Unit	0	-	2
	Terciptanya manajemen dan sytem pelayanan kesehatan yang profesional di puskesmas	37. Persentase puskesmas terakreditasi	%	10	76,67	100
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan KB	Terkendalnya jumlah penduduk dan meningkatnya parsitipasi Aktif KB	38. Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,56	0,54	0,50
		39. Cakupan peserta KB aktif	%	74,54	75,59	77,2
Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya persentase desa memiliki BUMDes	40. Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDesa)	%	5,4	33,3	100
Meningkatakan partisipasi pemuda serta prestasi olahraga	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	41. Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang	%	20	30	30



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2017	Kondisi Akhir
		diberangkatkan				
	Meningkatnya prestasi olah raga	42. Peringkat kabupaten dalam porprov	Peringkat	4	-	3
Meningkatkan kualitas penanganan PMKS	Berkurangnya masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS	43. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	58,45	62,85	78,57
Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perijinan penanaman modal	44. Nilai investasi PMA	ribu Us \$	2.500	1.250	71.430
		45. Nilai investasi PMDN	Juta Rp	2.960.091,9	389.486	5.884.964
		46. Jumlah jenis perijinan dan non perijinan investasi yang dilayani BPPT	Jenis	50	52	52
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengiriman transmigran	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan pemberangkatan transmigran	47. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,22	4,07	4,13
		48. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	KK	14	20	30
Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kepastian dalam penegakan hukum.	Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah	49. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	61	70	85
		50. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	50	60	80
Meningkatkan kualitas dan produktivitas aparatur sipil negara	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	51. Prosentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	79	80	100
		52. Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	54	75	100
Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas	Meningkatnya kualitas perencanaan dan	53. Persentase kesesuaian program antara	%	78	90	100



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2017	Kondisi Akhir
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan daerah	akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	RPJMD dengan RKPD				
		54. Nilai LKjIP	Skor	CC	CC	B
	Meningkatnya PAD dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	55. Peningkatan PAD	%	15,9	11,35	24,67
		56. Opini laporan keuangan BPK	%	WDP	WTP	WTP
		57. Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 2	Level 3
		58. Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 2	Level 2	Level 3
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik Pemda	59. Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	73,2	75	79
		60. Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda	%	100	100	100
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	61. Rasio penduduk ber KTP	%	87,99	95	100
		62. Rasio Bayi Ber akta kelahiran	%	82	85	100
	Meningkatnya kualitas e-government, pengelolaan data/informasi dan arsip daerah, serta pengamanan informasi sandi	63. Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	Skor	5,6	5,8	6,2
		64. Persentase PD yang memiliki buku profil data statistik	%	57,89	70	100
		65. Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	47,75	65,77	100
		66. Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100	100	100
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya kasus pencemaran	67. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	65,4	73	85
		68. Kasus pencemaran lingkungan	Kasus	7	5	0



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2015	2017	Kondisi Akhir
	lingkungan					
Meningkatkan kualitas penataan ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan.	69. Persentase Kawasan memiliki RTBL	%	0	50	100
		70. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan	Ha	71.948	71.948	71.948
	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan	71. Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	14	16	20
Meningkatkan penghayatan masyarakat terhadap agama yang dipeluknya	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	72. Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan	Kali	3	3	18
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelestarian budaya masyarakat	Lestarnya budaya lokal masyarakat	73. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	43,22	50	70
		74. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100
Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan.	Berkurangnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	75. Persentase Penduduk Miskin	%	13,68	12,68	10,68
		76. Pengeluaran riil perkapita (daya beli)	Rupiah	9.457	9.623	9.955
		77. Indeks Gini	-	0,31	0,30	0,27
		78. Nilai indeks Williamson	Indeks	0,19	0,18	0,15
Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan, serta pemenuhan hak anak	Berkurangnya ketimpangan laki-laki dan perempuan dan berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	79. Presentase kelembagaan PUG yang aktif	%	50	60	85
		80. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	46,7	46,73	47,85
		81. Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	194	123	98
		82. Persentase kecamatan layak anak	%	75	100	100



2. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan tahap pembangunan pertama RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai tahap implementasi dan evaluasi program pembangunan dan dalam rangka “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh dan menyeluruh”, maka disusun rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Tahun 2017 merupakan tahun pertama tahun awal dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 sehingga RKPD Tahun 2017 ini merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Grobogan tersebut.

Pembangunan daerah tahun 2017 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang mungkin terjadi. Adapun permasalahan pembangunan yang berkembang di Kabupaten Grobogan tahun 2017 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kurangnya Ketersediaan Air
2. Rusaknya Infrastruktur Perhubungan dan Transportasi
3. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran
4. Rendahnya Investasi
5. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Clean Government dan Good Governance
6. Belum Optimalnya Pengelolaan SDA Beserta Hasilnya
7. Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian dan Pemasaran Produk Pertanian dalam Arti Luas
8. Belum Optimalnya Pemerataan Akses Pelayanan Pendidikan dan Mutu Pendidikan Baik Formal maupun Non Formal
9. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Khususnya untuk Penduduk Miskin
10. Belum Optimalnya Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup



Dari rumusan permasalahan yang ada tersebut di susun prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2017. Prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal;
2. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Peningkatan pemerataan pembangunan;
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
6. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial;
7. Peningkatan program pro rakyat (penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan untuk semua;
8. Peningkatan kesadaran hukum;
9. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik;

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel II.3 sebagai berikut :

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2017

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Target
Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air				
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta sarana drainase perkotaan	Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	1. Persentase jalan - jembatan dalam kondisi baik	%	52,94



	Meningkatnya ketersediaan drainase perkotaan	2. Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.	% penduduk	42
Meningkatkan pemenuhan akses permukiman, air minum dan sanitasi yang layak.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	3. Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas kawasan kumuh yang ditetapkan SK Bupati.	%	0,036
			Ha	37,32
		4. Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	80
		5. Persentase cakupan pelayanan air minum	%	51
Meningkatkan pemenuhan air irigasi untuk pertanian	Meningkatnya fungsi sarana irigasi	6. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	83,1
Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana transportasi yang aman dan nyaman	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	7. Rasio ijin trayek	Ratio	0,021
		8. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	93



Misi 2 : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan				
Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan darat	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	9. Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura	%	14,39
		10. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/th	3
		11. Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,09
	Meningkatnya produksi perikanan	12. Produksi perikanan Budidaya per tahun	kg	2.094.756
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan	13. Skor PPH	Skor	87
		14. Ketersediaan cadangan pangan daerah	%	84
Misi 3 : Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata				
Menumbuhkembangkan usaha ekonomi kerakyatan baik koperasi dan UMKM, industri, maupun perdagangan	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)	15. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,1
		16. Pertumbuhan Industri	%	1,29
	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta kualitas koperasi	17. Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	97
		18. % UKM yang mampu mengakses permodalan	%	90
		19. Persentase koperasi aktif	%	89,2
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja	20. Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	44



	sektor perdagangan	21. Perkembangan nilai ekspor	Rp	142.742.480.000
Mengembangkan pariwisata daerah yang berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor wisata dalam pembangunan daerah	22. Kunjungan wisata	%	210.000
		23. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,81
Misi 4 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya				
Membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	24. Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	6,93
		25. Angka Harapan lama sekolah	Tahun	12,44
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan manajemen pelayanan pendidikan	26. Angka kelulusan SD/MI	%	100
		27. Angka kelulusan SMP/MTS	%	100
		28. Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	87,59
		29. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,99
	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	30. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun	Orang	23.000
Meningkatkan derajat kesehatan kesehatan yang semakin berkualitas dan merata	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	31. Angka usia harapan hidup	Tahun	74,12
		32. Angka Kematian Ibu	Kasus	29
		33. Angka Kematian Bayi	Per 1000	13,5



		(AKB)	KH	
		34. Persentase balita gizi buruk	%	0,04
	Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD	35. Tingkatan Akreditasi RS oleh KARS versi 2012	0	Lulus Paripurna (versi 2012)
	Terbangunnya rumah sakit tipe C	36. Jumlah Rumah Sakit Tipe C yang dibangun	Unit	-
	Terciptanya manajemen dan syitem pelayanan kesehatan yang profesional di puskesmas	37. Persentase puskesmas terakreditasi	%	76,67
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan KB	Terkendalnya jumlah penduduk dan meningkatnya parsitipasi Aktif KB	38. Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,54
		39. Cakupan peserta KB aktif	%	75,59
Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya persentase desa memiliki BUMDes	40. Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDesa)	%	33,3
Meningkatakan partisipasi pemuda serta prestasi olahraga	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	41. Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan	%	30
	Meningkatnya prestasi olah raga	42. Peringkat kabupaten dalam porprov	Peringkat	-



Meningkatkan kualitas penanganan PMKS	Berkurangnya masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS	43. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	62,85
Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja				
Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perijinan penanaman modal	44. Nilai investasi PMA	ribu	1.250
			Us \$	
		45. Nilai investasi PMDN	Juta Rp	389.486
		46. Jumlah jenis perijinan dan non perijinan investasi yang dilayani BPPT	Jenis	52
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengiriman transmigran	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan pemberangkatan transmigran	47. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,07
		48. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	KK	20
Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kepastian dalam penegakan hukum.	Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah	49. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	70
		50. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	60
Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik				



Meningkatkan kualitas dan produktivitas aparatur sipil negara	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	51. Prosentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80
		52. Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	75
Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	53. Persentase kesesuaian program antara RPJMD dengan RKPD	%	90
		54. Nilai LKJiP	Skor	CC
	Meningkatnya PAD dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	55. Peningkatan PAD	%	11,35
		56. Opini laporan keuangan BPK	%	WTP
		57. Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 2
		58. Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 2
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik Pemda	59. Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	75
		60. Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda	%	100
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	61. Rasio penduduk ber KTP	%	95
		62. Rasio Bayi Ber akta kelahiran	%	85



	Meningkatnya kualitas e-government, pengelolaan data/informasi dan arsip daerah, serta pengamanan informasi sandi	63. Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	Skor	5,8
		64. Persentase PD yang memiliki buku profil data statistik	%	70
		65. Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	65,77
		66. Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100
Misi 7 : Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang				
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya kasus pencemaran lingkungan	67. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	73
		68. Kasus pencemaran lingkungan	Kasus	5
Meningkatkan kualitas penataan ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan.	69. Persentase Kawasan memiliki RTBL	%	50
		70. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan	Ha	71.948



	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan	71. Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	16
Misi 8 : Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat				
Meningkatkan penghayatan masyarakat terhadap agama yang dipeluknya	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	72. Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan	Kali	3
Meningkatan kualitas penyelenggaraan pelestarian budaya masyarakat	Lestarinya budaya lokal masyarakat	73. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	50
		74. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100
Misi 9 : Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan				
Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan.	Berkurangnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	75. Persentase Penduduk Miskin	%	12,68
		76. Pengeluaran riil perkapita (daya beli)	Rupiah	9.623
		77. Indeks Gini	-	0,3
		78. Nilai indeks Williamson	Indeks	0,18
Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan	Berkurangnya ketimpangan laki-laki dan	79. Presentase kelembagaan PUG yang aktif	%	60



terhadap perempuan, serta pemenuhan hak anak	perempuan dan berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	46,73
		81. Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	123
		82. Persentase kecamatan layak anak	%	100

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2017



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Grobogan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.



Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core Area Pemerintah Kabupaten Grobogan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 85 s.d. 100 = Baik Sekali
- 70 s.d. <85 = Baik
- 55 s.d. <70 = Cukup
- < 55 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Grobogan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021. Tiga puluh lima Sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, memiliki indikator kinerja sasaran / indikator kinerja utama sebanyak 82 (delapan puluh dua) indikator terdiri dari :

1. Misi 1 memiliki 5 sasaran dengan 8 indikator;
2. Misi 2 memiliki 3 sasaran dengan 6 indikator;
3. Misi 3 memiliki 4 sasaran dengan 9 indikator;
4. Misi 4 memiliki 9 sasaran dengan 20 indikator;
5. Misi 5 memiliki 3 sasaran dengan 7 indikator;
6. Misi 6 memiliki 5 sasaran dengan 16 indikator;
7. Misi 7 memiliki 2 sasaran dengan 5 indikator;
8. Misi 8 memiliki 2 sasaran dengan 3 indikator;
9. Misi 9 memiliki 2 sasaran dengan 8 indikator.



Dari ke-empat puluh sasaran dengan delapan puluh dua Indikator Kinerja Utama, pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Terhadap Target Tahun 2017

Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air.						
Sasaran		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
1.1	Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik.	1	1			
1.2	Meningkatnya ketersediaan drainase perkotaan.	1	1			
1.3	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi.	3	2	1		
1.4	Meningkatnya fungsi sarana irigasi.	1	1			
1.5	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan.	2	2			
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			7	1	0	0
Rata – Rata Capaian Misi 1			Baik Sekali (116,39%)			
Misi 2 : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
2.1	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan.	3	3			



2.2	Meningkatnya produksi perikanan.	1	1			
2.3	Meningkatnya ketahanan pangan.	2	2			
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			6	0	0	0
Rata – Rata Capaian Misi 2			Baik Sekali (174,38%)			
Misi 3 : Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
3.1	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)	2	1			1
3.2	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Usaha Mikro KecilMenengah (UMKM)serta kualitas koperasi	3	2			1
3.3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan	2	2			
3.4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan	2	1			1
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			7	0	0	2
Rata – Rata Capaian Misi 3			Baik Sekali (146,52%)			
Misi 4 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
4.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan.	2	2			
4.2	Meningkatnya kualitas pendidikan dan manajemen pelayanan pendidikan	4	4			



4.3	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	1	1			
4.4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	4	4			
4.5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD	1	1			
4.6	Terbangunnya RS Tipe C	1	1			
4.7	Terciptanya manajemen dan system pelayanan kesehatan yang professional di Puskesmas	1	1			
4.8	Terkendalinya jumlah penduduk dan meningkatnya partisipasi aktif KB	2	2			
4.9	Meningkatnya persentase desa memiliki BUMDes	1			1	
4.10	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	1	1			
4.11	Meningkatnya prestasi olah raga	1	1			
4.12	Berkurangnya masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS	1			1	
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			17	0	3	0
Rata – Rata Capaian Misi 4			Baik Sekali (109,68%)			
Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
5.1	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perijinan penanaman modal.	3	2	1		
5.2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan pemberangkatan transmigran.	2				2
5.3	Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah.	2	2			
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			4	1	0	2



Rata – Rata Capaian Misi 5			Baik Sekali (291,38%)			
Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
6.1	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	2	2			
6.2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	2	2			
6.3	Meningkatnya PAD dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	4	4			
6.4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik Pemda	2	2			
6.5	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	2	2			
6.6	Meningkatnya kualitas e-goverment, pengelolaan data/informasi dan arsip daerah, serta pengamanan informasi sandi	4	3	1		
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			15	1	0	0
Rata – Rata Capaian Misi 6			Baik Sekali (126,21)			
Misi 7 : Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
7.1	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya kasus pencemaran lingkungan.	2	1	1		
7.2	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	2	2			



7.3	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan	1	1			
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			4	1	0	0
Rata – Rata Capaian Misi 7			Baik Sekali (96,66%)			
Misi 8 : Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
8.1	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	1	1			
8.2	Lestarnya budaya lokal masyarakat	2	2			
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			3	0	0	0
Rata – Rata Capaian Misi 8			Baik Sekali (122,22%)			
Misi 9 : Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
9.1	Berkurangnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	4	3			1
9.2	Berkurangnya ketimpangan laki-laki dan perempuan dan berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	4	3	1		
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			6	1		1
Rata – Rata Capaian Misi 9			Baik Sekali (93,49%)			
Rata – Rata Capaian Kinerja Tahun 2017			Baik Sekali (141,88 %)			
Rata – Rata Capaian Kinerja Tahun 2016			Baik Sekali (110,38 %)			



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 dengan cara membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja per sasaran strategis (Indikator Kinerja Utama) adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.1
Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase panjang jalan jembatan kondisi baik (%)	46,53	40,73	94,81	52,94	67,06	126,67	
Rata-rata Capaian Kinerja			94,81			126,67	

Sumber : Laporan, 2017.

Tabel III.3
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.2
Meningkatnya ketersediaan drainase perkotaan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun. (%)	38	38	100	42	42	100	
Rata-rata Capaian Kinerja			100			100	

Sumber : Laporan, 2017



Tabel III.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.3
Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		CAPAIAN 2015 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas kawasan kumuh yang ditetapkan SK Bupati.	0,045	0,045	100	0,036	0,002	194,44	
Persentase Cakupan Pelayanan Sanitasi	74,54	65	87,20	80	65	81,25	
Persentase cakupan pelayanan air minum	48	68,58	142,88	51	68,58	134,47	
Rata-rata Capaian Kinerja	110,03			136,72			

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.5
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.4
Meningkatnya fungsi sarana irigasi

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik.	82,5	83,25	100,91	83,1	83,25	100,18	
Rata-rata Capaian Kinerja			100,91			100,18	

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.6
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.5
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Rasio Ijin Trayek	0,02	0,018	90	0,021	0,020	95,24	



Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	92	92	100	93	92	98,92	
Rata-rata Capaian Kinerja	95			97,08			

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.7
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.1
Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016 (%)	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
Pertumbuhan Produksi Pertanian Pangan Hortikultura	12,11	12,11	100	14,39	13,47	93,61	
Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	3	3	100	3	16,2	540	
Pertumbuhan produksi peternakan	9,87	9,87	100	10,09	10,87	107,73	
Rata-rata capaian kinerja	100			247,11			

Sumber : Laporan, 2017.

Tabel III.8
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.2
Meningkatnya produksi perikanan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Produksi perikanan budidaya	1.989.321	2.033.760	102,23	2.094.756	2.148.711	102,58	
Rata-rata Capaian Kinerja	102,23			102,58			

Sumber : Laporan, 2017



Tabel III.9
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.3
Meningkatnya ketahanan pangan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85	87	102,35	87	88	101,14	
Ketersediaan cadangan pangan Daerah	82	85	103,66	84	85	101,19	
Rata-rata Capaian Kinerja			103,01			101,17	

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.10
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.1
Meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Kontribusi sector industri terhadap PDRB	2,90	11,54	397,93	3,1	15	483,87	
Pertumbuhan Industri	1,28	0,93	72,66	1,29	0,69	53,49	
Rata-rata Capaian Kinerja			235,30			268,68	

Sumber :Laporan, 2017

Tabel III.11
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.2
Meningkatnya jumlah dan kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta kualitas koperasi

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96	99,46	103,60	97	99,52	102,60	
Persentase koperasi dan UKM yang mengakses permodalan	90	80	88,89	90	80	88,89	



Persentase koperasi aktif	88,20	45,53	51,62	89,2	46,07	51,65	
Rata-rata Capaian Kinerja	81,37			81,05			

Sumber :Laporan, 2017

Tabel III.12
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.3
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	43,75	45	102,86	44	60	136,36	
Perkembangan nilai ekspor	142.387.400.000	214.608.485.100	150,72	142.742.480.000	289.959.676.284	203,13	
Rata-rata Capaian Kinerja	126,79			169,75			

Sumber :Laporan, 2017

Tabel III.13
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.4
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor wisata dalam pembangunan daerah

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Kunjungan wisata	208.000	418.203	201,06	210.000	398.511	189,77	
Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	0,79	0,091	11,97	0,81	0,072	8,89	
Rata-rata Capaian Kinerja	106,52			99,33			

Sumber :Laporan, 2017



Tabel III.14
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.1
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menempuh Pendidikan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Rata-rata Lama Sekolah	6,92	6,62	95,66	6,93	6,62	95,53	Data tahun 2016
Angka Harapan Lama Sekolah	12,35	12,26	99,27	12,44	12,26	98,55	Data tahun 2016
Rata-rata Capaian Kinerja	97,47			97,04			

Sumber :Laporan, 2017

Tabel III.15
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.2
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Manajemen Pelayanan Pendidikan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Angka kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	
Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	99,38	99,38	
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4	87,55	94,91	108,41	87,59	95,23	108,72	
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4	92,97	90,91	97,78	92,99	96,63	103,91	
Rata-rata Capaian Kinerja	101,55			103			

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.16
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.3
Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Jumlah pengunjung Perpustakaan Daerah dalam satu tahun (orang)	21.000	22.546	107,36	23.000	34.055	148,06	



Rata-rata Capaian Kinerja	107,36	148,06	
---------------------------	--------	--------	--

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.17
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.4
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Angka Usia Harapan Hidup	74,04	74,37	100,45	74,12	74,37	100,38	
Angka Kematian Ibu	30	28	106,67	29	18	137,93	
Angka Kematian Bayi	15	17,22	85,2	13,5	13,83	97,56	
Persentase Balita Gizi Buruk	0,05	0,03	140	0,04	0,01	175	
Rata-rata Capaian Kinerja	108,08			127,72			

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.18
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Tingkat Akreditasi RSUD oleh KARS versi 2012	Lulus Paripurna	Lulus Paripurna	100	Lulus Paripurna	Lulus Paripurna	100	
Rata-rata Capaian Kinerja	100			100			

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.19
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.6
Terbangunnya Rumah Sakit Tipe C

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Jumlah Rumah Sakit Tipe C yang dibangun	0	0	100	0	0	100	



Rata-rata Capaian Kinerja	100	100	
---------------------------	-----	-----	--

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.20
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.7
Terciptanya Manajemen dan Sistem Pelayanan Kesehatan yang
Profesional di PUSKESMAS

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase Puskesmas Terakreditasi	43,33	43,33	100	76,67	76,67	100	
Rata-rata Capaian Kinerja	100			100			

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.21
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.8
Terkendalinya Jumlah Penduduk dan Meningkatnya Partisipasi Aktif
KB

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk	0,56	0,35	137,5	0,54	0,35	135,19	
Cakupan Peserta KB Aktif	74,56	77,52	103,96	75,59	78,37	103,68	
Rata-rata Capaian Kinerja	120,73			119,46			

Sumber :Laporan, 2017

Tabel III.22
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.9
Meningkatnya Persentase Desa Memiliki BUMDesa

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDes)	19,40	13,92	71,75	33,3	19,78	59,40	



Rata-rata Capaian Kinerja	71,75	59,40	
---------------------------	-------	-------	--

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.23
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.10
Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase Prestasi Pemuda dalam Pembangunan	20	50	250	30	50	166,67	
Rata-rata Capaian Kinerja			250			166,67	

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.24
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.11
Meningkatnya Prestasi Olah Raga

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Peringkat Kabupaten dalam Porprov	-	4	400	-	-	100	
Rata-rata Capaian Kinerja			400			100	

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.25
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.12
Berkurangnya Masyarakat yang Termasuk dalam PMKS

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	60,25	40	66,39	62,85	40	63,64	
Rata-rata Capaian Kinerja			66,39			63,64	

Sumber : Laporan, 2017



Tabel III.26
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.1
Meningkatnya Realisasi Investasi Dan Kualitas Pelayanan Perijinan
Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Nilai Investasi PMA	65.180 (ribu US\$)	7.731,60 (ribu US\$)	11,86	1.250 (Ribu US\$)	19.129,40 (Ribu US\$)	1.530,35	
Nilai Investasi PMDN	3.937.533	28.717 (Juta Rp.)	72,93	389.486 (Juta Rp.)	309.511,50 (Juta Rp)	79,47	
Jumlah perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal yang keluaran BPPT	50	52	104	52	70	134,62	
Rata-rata Capaian Kinerja	62,93			581,48			

Sumber :Laporan, 2017

Tabel III.27
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.2
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Dan Pemberangkatan Transmigran

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,13	4,13	100	4,07	6,3	45,21	
Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	14	14	100	20	10	50	
Rata-rata Capaian Kinerja	100			47,61			

Sumber : Laporan, 2017



Tabel III.28
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.3
Menurunnya Pelanggaran Produk Hukum Daerah

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	67	67	100	70	70	100	
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Keteriban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	55	55	100	60	60	100	
Rata-rata Capaian Kinerja	100			100			

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.29
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.1
Meningkatnya Kompetensi dan Kedisiplinan ASN

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	80	74,79	93,49	80	74,79	93,49	
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	75	84	112	75	84	112	
Rata-rata Capaian Kinerja	102,75			102,75			

Sumber :Laporan, 2017



Tabel III.30
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.2
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Akuntabilitas Kinerja
Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	80	80	100	90	90	100	
Skor SAKIP	CC	CC	100	CC	CC	100	
Rata-rata Capaian Kinerja			100			100	

Sumber :Laporan, 2017

Tabel III.31
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.3
Meningkatnya PAD dan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase Peningkatan PAD	9,7	15,9	61,01	11,35	47,19	415,77	
Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	Capaian perkiraan
Tingkat Maturitas SPIP	Level 1	Level 1	100	Level 2	Level 2,04	100	
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 1	Level 1	100	Level 2	Level 3 DC	150	
Rata-rata Capaian Kinerja			90,25			191,44	

Sumber : Laporan, 2017



Tabel III.32
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.4
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada
Unit-Unit Pelayanan Publik Pemda

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Rata-rata skor Survey Kepuasan Masyarakat	74	78,33	105,85	75	78,33	104,44	
Persentase Penyelesaian Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Pemda (%)	100	100	100	100	100	100	
Rata-rata Capaian Kinerja	102,93			102,22			

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.33
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.5
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Rasio penduduk ber KTP	91	95	104,40	95	93	97,89	
Rasio bayi ber akta kelahiran	82,51	92	111,50	82,51	98	118,77	
Rata-rata Capaian Kinerja	107,95			108,33			

Tabel III.34
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.6
Meningkatnya Kualitas E-Goverment, Pengelolaan Data/Informasi
dan Arsip Daerah, serta Pengamanan Informasi Sandi

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Skor PeGI (Pemeringkatan e-Government)	5,7	4,35	75	5,8	4,35	75	
Persentase PD yang memiliki buku profil data statistik	60	60	100	70	70	100	
Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	47,75	100	209,42	65,77	100	152,04	



Persentase Informasi Pemerintah Daerah melalui Sarana Sandi dan Telekomunikasi yang Tersampaikan Kepada Pihak terkait (%)	90	100	111,11	100	100	100	
Rata-rata Capaian Kinerja	123,88			106,76			

Sumber :Laporan, 2017

Tabel III.35
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 7.1
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Berkurangnya Kasus Pencemaran Lingkungan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70	100	142,86	73	60,80	83,29	
Kasus Pencemaran Lingkungan	6	6	100	5	5	100	
Rata-rata Capaian Kinerja	121,43			91,65			

Sumber :Laporan, 2017

Tabel III.36
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 7.2
Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang Dan Terkendalinya Alih Fungsi Lahan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase Kawasan memiliki RTBL	0	0	100	50	50	100	
Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan	71.948	71.948	100	71.948	71.948	100	
Rata-rata Capaian Kinerja	100			100			

Sumber :Laporan, 2017



Tabel III.37
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 7.3
Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	15	15	100	16	16	100	
Rata-rata Capaian Kinerja	100			100			

Sumber :Laporan, 2017

Tabel III.38
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 8.1
Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan, Rasa Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan	3	5	166,67	3	5	166,67	
Rata-rata Capaian Kinerja	166,67			166,67			

Sumber :Laporan, 2017

Tabel III.39
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 8.2
Lestarnya Budaya Lokal Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	45	75	166,67	50	80	160	
Persentase Benda, Situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100	
Rata-rata Capaian Kinerja	133,34			130			

Sumber :Laporan, 2017



Tabel III.40
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 9.1
Berkurangnya Kemiskinan, Kesenjangan Antar Wilayah dan
Kesenjangan Antar Kelompok Pendapatan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase Penduduk Miskin	13,18	13,59	96,89	12,68	13,13	96,45	Data tahun 2016
Pengeluaran riil perkapita (daya beli)	9.540	9.487	100,56	9.623	9.487	98,59	Data tahun 2016
Indeks Gini	0,31	0,29	106,45	0,3	0,29	103,33	Data tahun 2015
Nilai Indeks Wiliamson	0,19	0,83	2,37	0,18	0,83	2,61	Data propinsi tahun 2013
Rata-rata Capaian Kinerja	76,56			75,25			

Sumber : Laporan, 2017

Tabel III.41
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 9.2
Berkurangnya Ketimpangan Laki-Laki dan Perempuan dan
Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		CAPAIAN 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 (%)	KETR.
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase kelembagaan PUG yang aktif	55	60	109,1	60	100	166,67	
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	46,7	46,68	100,04	46,73	50,39	107,83	
Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	101	90	110,89	123	89	72,36	
Persentase Kecamatan Layak Anak	100	100	100	100	100	100	
Rata-rata Capaian Kinerja	105,01			111,72			

Sumber :Laporan, 2017



B. REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI

Tabel III.42
Realisasi Anggaran yang Digunakan
untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Anggaran APBD 2017 (Rp)
Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air					
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta sarana drainase perkotaan	Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dengan prioritas pada jalan dan jembatan dalam kondisi rusak berat	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	16.145.000.000
				Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6.800.000.000
	Meningkatnya ketersediaan drainase perkotaan	Meningkatkan fungsi drainase pembangunan dan rehabilitasi drainase di wilayah perkotaan	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi drainase khususnya pada wilayah rawan genangan.	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	1.366.000.000
Meningkatkan pemenuhan akses permukiman, air minum dan sanitasi yang layak.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	Meningkatkan penataan perumahan dan permukiman, serta penyediaan akses air minum dan sanitasi layak.	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan fokus pada penanganan kawasan kumuh, dan penyediaan sarana air minum dan sanitasi	Program Lingkungan Sehat perumahan	8.207.000.000
				Program pengembangan Perumahan	225.000.000
				Program Penyediaan dan pengolahan air baku	0
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	0
Meningkatkan pemenuhan air irigasi untuk pertanian	Meningkatnya fungsi sarana irigasi	Meningkatkan fungsi irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi drainase dengan prioritas pada jaringan irigasi yang rusak sedang dan berat	Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.	40.337.640.000
Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana transportasi yang aman dan nyaman.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan ijin trayek dan pemenuhan angkutan umum pada jalan kabupaten.	Pemenuhan sarana dan prasarana angkutan umum dan fasilitas keselamatan jalan pada titik rawan kecelakaan.	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	250.000.000



				Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	0
				Program Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan	350.000.000
JUMLAH ANGGARAN MISI I					85.980.640.000
Misi 2 : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan					
Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan darat	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui penyediaan sarana produksi dan pemberdayaan kelompok tani	Peningkatan pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat pertanian tepat guna, serta pengembangan sistem pertanian berkelanjutan terutama pada jenis komoditas pertanian unggulan lokal	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	16.612.330.000
					0
				Program Peningkatan produksi Perkebunan	2.450.500.000
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	5.450.000.000
	Meningkatnya produksi perikanan	Pengembangan budidaya perikanan darat melalui penyediaan sarana produksi dan	Pengembangan budidaya perikanan darat pada kawasan peruntukan perikanan sesuai dengan rencana	Program pengembangan Perikanan Budidaya	2.833.169.000



		pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan	tata ruang wilayah		
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan serta meningkatkan pola konsumsi pangan yang BISA (berimbang, beragam, sehat, dan aman).	Pemantauan pasokan dan harga pangan pokok, penyediaan cadangan pangan sesuai standar, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai konsumsi pangan yang BISA	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2.539.000.000
JUMLAH ANGGARAN MISI 2					29.884.999.000
Misi 3 : Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata					
Menumbuhkembangkan usaha ekonomi kerakyatan baik koperasi dan UMKM, industri, maupun perdagangan	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Meningkatkan industri kecil dan menengah melalui pembinaan dalam memperkuat jaringan klaster industri	Pengembangan dan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dan pengembangan sentra industri potensial	Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi	0
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	0
				Program Penataan Struktur Industri	0
	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta kualitas koperasi	Meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM dan koperasi melalui kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah serta peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan kapasitas dan pembinaan, pemberian bantuan peralatan usaha, dan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM dan pengurus koperasi	Program pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil Menengah	0
				Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	70.000.000
				Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.	430.000.000
				Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.000.000.000
				Program pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan	90.000.000
				Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor	140.000.000
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan	Meningkatkan kerjasama jaringan perdagangan internasional maupun regional serta revitalisasi pasar tradisional	Pengembangan jaringan perdagangan dan rehabilitasi pasar dengan prioritas pada pasar yang berkondisi tidak layak.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	645.000.000
Mengembangkan pariwisata daerah yang berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor	Pengembangan destinasi wisata sesuai potensi yang dimiliki daerah dengan	Pengembangan destinasi wisata yang sudah ada dan pembangunan		



	wisata dalam pembangunan daerah	melibatkan pelaku usaha di bidang wisata.	destinasi wisata baru, serta meningkatkan promosi melalui berbagai media	Program pengembangan Destinasi Pariwisata	596.000.000
JUMLAH ANGGARAN MISI 3					2.971.000.000
Misi 4 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya					
Membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan melalui pemberian beasiswa dan penambahan sarana dan prasarana sekolah	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pembangunan ruang kelas baru (RKB) rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan berat.	Program PAUD	121.0326.000
				Program Pendidikan Non Formal	1.394.562.000
				Program pendidikan Dasar 9 Tahun	34.546.068.594
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan manajemen pelayanan pendidikan	Peningkatan ruang penunjang lainnya (RPL) serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	Pembangunan ruang penunjang lainnya (RPL) dan peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	12.531.750.000
		Meningkatkan pelayanan pendidikan melalui penguatan lembaga pendidikan.	Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan melalui fasilitasi akreditasi	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.539.186.000
		Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan pendidikan	Meningkatkan peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah melalui pelatihan dan pelibatan pengambilan kebijakan.		
	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Meningkatkan minat baca dengan mengembangkan perpustakaan yang berkualitas dan kampanye minat baca kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dengan penyediaan bahan bacaan pada perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	639.200.000



Meningkatkan derajat kesehatan kesehatan yang semakin berkualitas dan merata	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, kualitas SDM Kesehatan, dan perbaikan manajemen kesehatan	Peningkatan kesehatan masyarakat dengan prioritas pada pelayanan promotif dan preventif serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM bidang medis	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	52.461.719.500
				Program Pencegahan Dan penanggulangan penyakit Menular	668.435.000
				Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	536.453.500
	Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD, Terbangunnya rumah sakit tipe C, dan terciptanya manajemen dan pelayanan kesehatan yang profesional di puskesmas	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan melalui perluasan cakupan sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan peran dan fungsi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan RSUD dengan fokus pada akreditasi dan perluasan cakupan pelayan.	Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.	9.630.000.000
				Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.	0
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan KB	Terkendalnya jumlah penduduk dan meningkatnya parsitipasi Aktif KB	Pengendalian penduduk melalui optimalisasi pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KB serta promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Program Keluarga Berencana	3.626.808.000
				Program pelayanan kontrasepsi	96.100.000
Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya persentase desa memiliki BUMDes	Pengembangan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan, dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembangan BUMDesa	Pengembangan perekonomian desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	508.063.000



Meningkatakan partisipasi pemuda serta prestasi olahraga	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya prestasi olah raga	Pembinaan bagi atlit dan penyelenggaraan berbagai event olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi serta penguatan organisasi dan kapasitas kepemudaan dalam pembangunan	Pembinaan dan pemberian <i>reward</i> kepada atlit dan pelatihan olahraga berprestasi dan penyediaan sarana prasarana olahraga serta pembinaan dan fasilitasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga	960.000.000
				Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	40.000.000
Meningkatkan kualitas penangnan PMKS	Berkurangnya masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS	Meningkatkan pelayanan PMKS melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, pemberian bantuan serta peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat	Pemberian jaminan perlindungan dan rehabilitasi sosial difokuskan pada keluarga rentan, LUT, PGOT dan tuna susila.	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	260.000.000
				Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	235.000.000
				JUMLAH ANGGARAN MISI 4	
Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja					
Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perijinan penanaman modal	Meningkatkan kemudahan pelayanan perijinan maupun non perijinan, peningkatan sarana dan prasarana penunjang investasi, optimalisasi promosi peluang berinvestasi, serta penyediaan lahan investasi.	Peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang cepat melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), peningkatan jaringan dengan investor serta penyediaan kawasan industri.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	460.000.000
					☐
					☐
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	☐
					☐
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengiriman transmigran	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan pemberangkatan transmigran	Meningkatkan penyerapan kerja dengan meningkatkan kualitas calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja dengan mengoptimalkan BLK, serta fasilitasi pengiriman transmigrasi	- Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, magang kerja, dan pengembangan bursa kerja online. - Peningkatan kerjasama dalam penempatan transmigrasi	Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	530.000.000
				Program peningkatan Kesempatan Kerja	480.000.000
				Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	440.000.000



				Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	
				Program Transmigrasi	430.000.000
Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kepastian dalam penegakan hukum.	Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah	Meningkatkan penegakan Perda melalui pelaksanaan patroli dan operasi, serta antisipasi penanganan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.	Peningkatan pendidikan politik, pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP; dan penegakan peraturan daerah	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	174.000.000
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	55.000.000
JUMLAH ANGGARAN MISI 5					2.569.000.000
Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik					
Meningkatkan kualitas dan produktivitas aparatur sipil negara	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	Penempatan pegawai sesuai standar kompetensi dan peningkatan kedisiplinan pegawai melalui pemberian reward dan punishment	Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, pengisian jabatan sesuai standar kompetensi, serta peningkatan Diklat bagi ASN sesuai kebutuhan; serta penegakan kedisiplinan bagi ASN	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	0
				Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	0
				Program peningkatan disiplin aparatur	0
Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	0
	Meningkatnya PAD dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Menata sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan seluruh Perangkat Daerah, dan meningkatkan kapasitas pemeriksa dalam pembinaan dan pemeriksaan pelaksanaan pembangunan	Peningkatan perbaikan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan Peningkatan pembinaan dan pemeriksaan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	0
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	0



Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik Pemda	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SOP dan SPP secara konsisten dan menyeluruh	Optimalisasi penerapan SOP dan SPP dengan fokus pada Perangkat Daerah yang memiliki unit pelayanan langsung kepada masyarakat	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kependudukan	Program penataan administrasi kependudukan	0
	Meningkatnya kualitas e-government, pengelolaan data/informasi dan arsip daerah, serta pengamanan informasi sandi	Meningkatkan kapasitas SDM dan peran seluruh perangkat daerah dalam pengembangan e-government, pengelolaan arsip, pengelolaan data statistik dan persandian	Pengembangan aplikasi dan infrastruktur penunjang e-government, penerapan pengelolaan arsip secara baku, dan perbaikan manajemen pengelolaan data dan sandi.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.418.332.000
				Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	300.000.000
				Program pengelolaan data/informasi statistik daerah	0
JUMLAH ANGGARAN MISI 6					2.718.332.000
Misi 7 : Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang					
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya kasus pencemaran lingkungan	Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam melalui Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA serta Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ramah lingkungan	Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan fokus pada perlindungan dan konservasi lingkungan serta penegakan hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	750.000.000
Meningkatkan kualitas penataan ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan, dan meningkatnya luasan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan	Menyediakan dokumen penataan kawasan strategis, serta pengendalian pemanfaatn lahan sesuai dengan peruntukannnya, serta menyediakan lahan dalam pengembangan RTH di kawasan perkotaan	Peningkatan pengelolaan penataan ruang dengan fokus pada pengawasan pemanfaatan ruang, dan pengembangan RTH di kawasan perkotaan	Program Pemanfaatan Ruang	150.000.000
JUMLAH ANGGARAN MISI 7					900.000.000
Misi 8 : Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat					



Meningkatkan penghayatan masyarakat terhadap agama yang dipeluknya	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan penghayatan nilai keagamaan melalui pembinaan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Penyelenggaraan forum kerukunan umat beragama dan pengembangan nilai nilai agama di lingkungan masyarakat	Program Kerukunan Umat Beragama	0
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelestarian budaya masyarakat	Lestarnya budaya lokal masyarakat	Meningkatkan kelestarian budaya melalui pelestarian nilai-nilai dan seni budaya lokal serta daerah pelestarian cagar budaya	Pelestarian budaya lokal dengan fokus pada seni dan budaya lokal yang hampir punah	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	355.000.000
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	245.000.000
JUMLAH ANGGARAN MISI 8					600.000.000
Misi 9 : Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan					
Menurunkan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Berkurangnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Mengurangi kesenjangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan disparitas antar wilayah melalui pemerataan pembangunan dan pertumbuhan pusat perekonomian baru	Peningkatan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan fokus pada pengembangan pusat perekonomian baru ditiap tiap kecamatan dan desa dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	400.000.000
Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan, serta pemenuhan hak anak	Berkurangnya ketimpangan laki-laki dan perempuan dan berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan lembaga berbasis gender dan anak dalam pengarusutamaan gender dan anak, bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha, serta optimalisasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan anak, peningkatan kualitas hidup perempuan dan tumbuh kembang anak, serta pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan.	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	300.000.000
				Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	284.473.000
JUMLAH ANGGARAN MISI 9					984.473.000
ANGGARAN PADA APBD PENETAPAN 2017 YANG DIGUNAKAN UNTUK MENUNJANG SASARAN RPJMD 2016-2021					344.704.126.005
REKAPITULASI BELANJA PADA APBD 2017 (PENETAPAN)					1.048.599.950.000

Sumber : Perda RPJMD 2016-2021 dan Perda APBD 2017 (diolah)

BAB IV

P E N U T U P

Dari seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditampilkan secara ringkas sebagai berikut :

1. **Kebijakan Pemerintah Daerah** Tahun 2017, telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2017. RKPD ini merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan prioritas pembangunan daerah, sebagai penjabaran dari visi misi daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021.
2. Dalam RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2017, telah ditetapkan **Prioritas Pembangunan Daerah** Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Infrastruktur
Terlaksananya pembangunan jalan Kabupaten, jalan penghubung desa, irigasi pertanian, sarana prasarana pertanian serta penataan perkotaan yang baik.
 - b. Pemberian Jaminan Kredit UMKM
Keterbatasan akses permodalan, masih minimnya jaminan pemerintah dalam pemberian kredit usaha, tingkat pengetahuan manajemen dan pengelolaan keuangan yang rendah serta suku bunga yang tinggi menjadi penghambat utama dalam upaya penumbuhan ekonomi sektor riil. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 melaksanakan :
 - Kebijakan dan regulasi yang memberikan perlindungan terhadap upaya pemberdayaan UMKM

- Meningkatkan kemampuan manajemen keuangan bagi pelaku usaha mikro dan informasi melalui Pendamping Wira Usaha (PWU)
 - Menciptakan regulasi yang memberi kemudahan serta jaminan kredit bagi pelaku usaha ekonomi mikro
 - Memberikan kredit tanpa jaminan melalui Kredit Usaha Produktif
- c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru di pedesaan sebagai upaya pemerataan pembangunan ekonomi.

Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan pusat-pusat perekonomian di pedesaan menjadi proyek solutif Pemerintah Kabupaten untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang selama ini selalu berpusat di tengah kota. Jika pembangunan ekonomi selalu diukur melalui pertumbuhan ekonomi makro yang salah satunya ditandai dengan menjamurnya industri-industri besar yang berpusat di kota, maka untuk selanjutnya pertumbuhan ekonomi harus diukur melalui pembangunan ekonomi yang merata di seluruh aspek.

- d. Program Wajib Belajar 12 Tahun Gratis (SPP)

Dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), SMK dan Madrasah Aliyah (MA), dengan optimalisasi dan maksimalisasi penggunaan subsidi anggaran pemerintah untuk pendidikan minimal sebesar 20 % dengan dibantu anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Grobogan.

- e. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Memberikan dan menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang gratis dan berkualitas di setiap PUSKESMAS. Menciptakan manajemen dan sistem pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas sampai ke tingkat Puskesmas Pembantu.

- f. Upaya merubah fungsi RSUD sebagai lembaga bersifat Profit Oriented (berorientasi keuntungan) menjadi Sadar Layanan Umum (BLU) yang bersifat service oriented (mengedepankan pelayanan yang berkualitas) berdasar prinsip keadilan dan

membebaskan biaya perawatan kesehatan kelas 3 bagi masyarakat ber-KTP Grobogan.

- g. Memberikan santunan kepada warga yang meninggal dunia untuk meringankan beban bagi setiap warga yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan antara 1-2,5 juta rupiah untuk meringankan beban keluarga.

3. APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2016, sedangkan perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2017.

4. Secara ringkas, realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, masih bersifat sementara, karena belum selesai diaudit oleh BPK RI, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp.2.489.049.567.445,- terealisasi Rp.2.426.633.726.629,- atau 97,49%, dengan komposisi sumber pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah 18,15%; Dana Perimbangan 81,61%; dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah 0,24%.

Adapun rincian Pendapatan Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp.440.891.892.189,- terealisasi Rp.440.415.301.299,- atau 99,89%.
- b. Dana Perimbangan dengan target Rp.1.584.695.623.202,- terealisasi Rp.1.530.097.859.511,- atau sebesar 96,55%.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan target sebesar Rp.463.462.052.054,- terealisasi Rp.456.120.565.819,- atau 98,42%.

b. Belanja Daerah

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Grobogan berdasarkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.770.227.562.352,- terealisasi sebesar Rp.2.553.130.422.697,- atau 92,16%, dengan perincian target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.409.305.955.412,- terealisasi sebesar Rp.1.342.042.039.747,- atau 95,23% dan target Belanja Langsung sebesar Rp.1.360.921.606.940,- terealisasi Rp.1.211.088.382.950,- atau sebesar 88,99%.

c. Pembiayaan Daerah

Pada tahun anggaran 2017 Pembiayaan Netto dalam angka positif, sehingga dapat menutup defisit anggaran dan masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.135.471.382.573,-.

5. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2017 antara lain sebagai berikut :
 - a. Permasalahan yang dihadapi dalam Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air. Antara lain sebagai berikut :
 - 1) Masih kurangnya jumlah SDM Aparatur yang menangani urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - 2) Tidak berjalannya mekanisme perencanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta munculnya *conflict of interest* dalam penyusunan perencanaan kegiatan.
 - 3) Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - 4) Keterbatasan kapasitas manajerial dalam pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman,

sehingga sulitnya pencapaian sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan terkait dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

- 5) Rendahnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

b. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Masyarakat petani belum memahami kepemilikan bantaran sungai sehingga banyak digunakan untuk lahan pertanian dan perumahan.
- 2) Masih adanya petani yang belum mematuhi pola tanam yang disepakati dan dianjurkan oleh pemerintah (Dinas terkait).
- 3) Masih kurangnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya proses pengadaan barang/ jasa.

c. Permasalahan yang dihadapi dalam Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Masih lemahnya kemampuan SDM dalam mengelola lembaga koperasi dan UMK.
- 2) Masih kurang optimalnya kinerja kelembagaan manajemen koperasi dalam pelaksanaan kegiatan RAT yang masih sering tidak mencapai target yang diharapkan
- 3) Masih kurangnya kemampuan gerakan koperasi dalam implementasi program akuntansi komputer untuk meningkatkan manajemen kinerja kelembagaan.
- 4) Masih sering terjadinya keterlambatan KUMKM dalam melengkapi berkas persyaratan untuk pembentukan koperasi dan perijinan usaha bagi UMK.
- 5) Terus menurunnya anggaran yang diperuntukkan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
- 6) Lemahnya gerakan Koperasi dan UKM dalam mengakses permodalan.

- 7) Banyaknya Lembaga Keuangan Mikro (UKM) yang belum berbadan hukum.
- 8) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata di semua obyek wisata di Kabupaten Grobogan dikarenakan penanganan dan pengelolaan yang masih kurang optimal dan infrastruktur jalan yang kurang mendukung;
- 9) Masih kurangnya kesadaran masyarakat sekitar obyek wisata yang masuk dalam kelompok sadar wisata dalam ikut mengelola dan memelihara kebersihan dalam obyek wisata;
- 10) Masih kurangnya kesempatan untuk melaksanakan promosi pariwisata didalam dan diluar daerah Kabupaten Grobogan, dikarenakan sulitnya mengkoordinasi para seniman daerah, masih minimnya macam kesenian daerah yang dapat menunjang pariwisata dan mahalnya stand pameran;
- 11) Investor luar kurang tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang pariwisata di kabupaten Grobogan;
- 12) Sebagian besar konsumen/ pelaku usaha belum memahami UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- 13) Sebagian konsumen/ pelaku usaha belum menyadari akan pentingnya tera dan tera ulang.
- 14) Masih adanya barang barang di toko, pasar dan toko modern yang tidak sesuai dengan ketentuan (pelabelan, standart kadaluwarsa)
- 15) Belum optimalnya peralatan mesin drayer gudang SRG.
- 16) Fluktuasi harga yang terjadi di masyarakat terutama pada saat menghadapi Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.
- 17) Pedagang belum memahami hak dan kewajiban berkaitan dengan izin pemakaian tempat
- 18) Belum bisa dilaksanakan pemindahan 603 pedagang pasar Nglendoh karena paguyuban pedagang belum bisa diajak koordinasi kaitannya relokasi penempatan Pasar Unggas.

19) Belum dipatuhinya jam berjualan dan zona Pedagang Kaki Lima dan Asongan

d. Permasalahan yang dihadapi dalam Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan sarana prasarana pendidikan khususnya perpustakaan, laboratorium, media pembelajaran dll sehingga mutu lulusannya masih rendah.
- 2) Masih ada sekolah yang kondisi gedungnya memprihatinkan.
- 3) Masih banyak siswa yang tidak melanjutkan sekolah atau terpaksa drop out karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan sekolah.
- 4) Masih terbatasnya kader remaja yang mempunyai bakat di bidang Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) sehingga pengiriman kafilah MTQ di tingkat Provinsi tidak optimal.
- 5) Masih kurangnya personil/pegawai yang menangani pemberkasan hibah baik fisik maupun tunjangan fungsional guru keagamaan.
- 6) Masih kurangnya kebutuhan tenaga PNS untuk mendukung kinerja Dinas , mengingat jumlah PNS yang ada sekarang ini belum mencukupi sehingga perlu penambahan PNS.
- 7) Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan presentatif yang mana Gedung Olah Raga belum maksimal dalam pengelolaannya.
- 8) Masih Kurangnya pembinaan yang berjenjang pada atlet yang berprestasi.
- 9) Masih kurangnya pembinaan pada pemuda agar mereka dapat berdikari sendiri dan rasa nasionalisme yang kurang.
- 10) Pencapaian Akseptor KB Pria (MOP dan Kondom) masih rendah.
- 11) Pendapatan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera masih rendah.

- 12) Adanya prasarana di perdesaan yang kurang memadai, sedangkan setiap desa memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan untuk mendukung pemberdayaan berbasis masyarakat.
 - 13) Masih tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan dan pengangguran yang cukup banyak.
 - 14) Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, masih rendahnya kelompok binaan lembaga masyarakat, hal ini dapat diketahui rata-rata jumlah kelompok PKK yang dibina baru mencapai 13,57%, LPM berprestasi sebesar 0,44%, dan rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat masih rendah yaitu baru mencapai 13,57%.
 - 15) Usaha ekonomi produktif belum dapat berkembang sesuai harapan, hal ini dapat dilihat jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang tidak aktif dan tidak memberikan kontribusi dalam penyediaan atau memfasilitasi modal usaha. Sehingga usaha ekonomi masyarakat, usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang berbasis pemberdayaan masyarakat belum optimal ditandai dengan masih rendahnya prosentase lembaga keuangan mikro yang aktif.
 - 16) Komitmen dan tanggungjawab masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pasca program masih rendah, hal ini terbukti capaian kinerjanya baru mencapai 14,5%.
 - 17) Masih kurangnya kesadaran Kepala Desa dalam memfungsikan secara penuh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - 18) Kesulitan pelaporan yang tepat waktu.
- e. Permasalahan yang dihadapi dalam Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Arah minat transmigrasi tidak sebanding dengan lokasi transmigrasi.
 - 2) Alokasi kuota penempatan yang sedikit tidak sebanding dengan peminat transmigran.
- f. Permasalahan yang dihadapi dalam Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Masih kurangnya tenaga pemeriksa/pejabat fungsional berupa auditor dengan latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi, Hukum, Teknik, dan Apoteker. Hal ini disebabkan obyek pemeriksaan kedepan semakin kompleks dan beban tugas diluar pemeriksaan semakin banyak.
 - 2) Masih terbatasnya anggaran yang diberikan.
 - 3) Masih kurangnya peralatan pendukung kerja (dokumentasi kegiatan kedinasan unsur pimpinan daerah, ex: lensa foto tele, video shoting).
 - 4) Masih kurangnya personil yang kompeten.
 - 5) Sering dan cepatnya Peraturan Perundang-undangan dari pusat yang berubah-ubah yang tidak disertai dengan Peraturan Pelaksananya.
 - 6) Kurangnya pemahaman akan peraturan pengelolaan keuangan.
- g. Permasalahan yang dihadapi dalam Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Kurang optimalnya penanganan pelanggaran Perda, di sebabkan belum optimalnya PPNS yang membidangi penyidikan pelanggaran Perda karena jumlahnya baru 2 personil, serta koordinasi antar SKPD terkait kurang maksimal.
 - 2) Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk mentaati peraturan daerah di dalam menciptakan suasana yang tertib dan aman.

- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya PKL untuk mematuhi peraturan daerah didalam menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban
 - 4) Mencermati situasi yang berkembang adanya beberapa aduan masyarakat maupun demo yang berkaitan dengan penambangan galian C yang beroperasi belum memiliki izin dan berdampak pada kerusakan lingkungan.
 - 5) Banyaknya bermunculan usaha tempat hiburan Cafe karaoke yang tidak berijin, maupun Café karaoke yang ijinnya sudah habis masa berlakunya.
 - 6) Aduan Masyarakat adanya beberapa Hotel dan rumah kost yang berada ditengah lingkungan warga masyarakat yang dikhawatirkan akan mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
 - 7) Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang pencemaran lingkungan.
 - 8) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
 - 9) Belum optimalnya koordinasi antar sektor dan daerah dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
 - 10) Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - 11) Masih kurangnya jumlah aparatur dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - 12) Masih banyaknya perusahaan/usahawan yang belum secara efektif mentaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan masih rendahnya ketaatan dalam ketentuan dokumen lingkungan.
 - 13) Kurangnya Peraturan Daerah ynag Mengatur tentang Lingkungan.
- h. Permasalahan yang dihadapi dalam Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya kreatifitas masyarakat Grobogan akan pengembangan kesenian daerah.
 - 2) Masih kurangnya pengenalan seni budaya asli Grobogan.
 - 3) Upacara tradisional di Kabupaten Grobogan mulai di tinggalkan.
 - 4) Masih kurangnya minat masyarakat di Grobogan tentang pembuatan Film.
 - 5) Kurang berkembangnya organisasi seni tradisional di kabupaten Grobogan karena kurang lengkapnya alat seninya.
 - 6) Kurang mengertinya masyarakat Grobogan akan benda-benda cagar budaya yang mempunyai nilai budaya tinggi.
 - 7) Kurangnya Dana untuk menunjang kegiatan.
- i. Permasalahan yang dihadapi dalam Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Pemahaman terhadap Isu Gender pada semua lapisan masyarakat masih rendah.
 - 2) Data Pilah Gender dalam program / kegiatan pada SKPD belum maksimal
6. Solusi-solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
- a. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air adalah sebagai berikut :
- 1) Diusulkan penambahan jumlah SDM/ staf teknis untuk pengelolaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

- 2) Fasilitasi peningkatan intensitas koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - 3) Diusulkan penambahan ketersediaan anggaran guna pelaksanaan kegiatan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - 4) Peningkatan kapasitas sumber daya organisasi
 - 5) Fasilitasi secara berkesinambungan koordinasi dengan masyarakat terkait urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - 6) Reschedule kegiatan.
 - 7) Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat pengguna jalan khususnya pemilik kendaraan tentang pentingnya mentaati peraturan / tata tertib berlalu lintas.
 - 8) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan meningkatkan operasi bersama guna penertiban lalu lintas bagi kendaraan angkutan umum.
 - 9) Memberikan pembinaan terhadap awak / kru kendaraan angkutan umum tentang tata tertib berlalu lintas.
 - 10) Menambah fasilitas, sarana dan prasarana perhubungan serta memelihara secara maksimal terhadap fasilitas/perlengkapan lalu lintas yang sudah ada dengan baik.
- b. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :
- 1) Pembinaan kelompok tani dan memanfaatkan setiap forum yang ada untuk menyadarkan petani dan masyarakat sekitar tentang fungsi dan manfaat dari bantaran sungai.
 - 2) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) tentang tata pola tanam yang tepat dalam skala yang luas.
 - 3) Mengadakan rapat koordinasi dibidang pengadaan barang/jasa

- c. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata, adalah sebagai berikut :
- 1) Perlunya Peningkatan kualitas manajemen SDM pada KUMKM melalui program kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan
 - 2) Meningkatkan pembinaan manajemen kelembagaan melalui kegiatan peningkatan optimalisasi kinerja kelembagaan.
 - 3) Memberikan fasilitasi pengembangan SDM pada gerakan koperasi melalui bimbingan teknis aplikasi akuntansi komputer.
 - 4) Memberikan fasilitasi kemudahan prosedur dalam pengurusan perijinan bagi KUMKM.
 - 5) Meningkatkan temu usaha/kontak dagang dengan perbankan dan pihak terkait.
 - 6) Melakukan sosialisasi UU no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada konsumen/ pelaku usaha.
 - 7) Melakukan sosialisasi UU no.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal kepada konsumen/ pelaku usaha.
 - 8) Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan/ atau jasa ditoko, pasar dan toko modern.
 - 9) Meningkatkan pemeliharaan peralatan mesin drayer sehingga bisa dapat difungsikan, terutama pada saat musim hujan sehingga padi bisa dapat dikeringkan tanpa tergantung cuaca.
 - 10) Meningkatkan monitoring dan laporan sehingga dapat diketahui perkembangannya untuk dapat dipakai dasar mengambil kebijakan bagi stake holder/ pimpinan.
 - 11) Melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif ke pedagang dan mengoptimalkan personil yang ada di UPTD Pasar Daerah.
 - 12) Pendekatan persuasif kepada paguyuban dan mengadakan koordinasi secara arif dan bijaksana bahwa pemindahan tersebut demi ketertiban, kelancaran dan kemajuan

masyarakat Grobogan, dan agar diusulkan kembali pelaksanaan Sosialisasi dan Pemindahan Pedagang Pasar Glendoh ke Pasar Unggas pada tahun 2018.

- 13) Melakukan sosialisasi dan pembinaan pada Pedagang Kaki Lima dan Asongan secara intensif dan pembentukan satgas Pedagang Kaki Lima (PKL).
- d. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya, adalah sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan sarana prasarana dan gedung sekolah yang memenuhi standar kelayakan dengan menambah alokasi anggaran untuk peningkatan sarana prasarana sekolah.
 - 2) Peningkatan rehabilitasi gedung sekolah.
 - 3) Alokasi anggaran untuk bantuan siswa yang tidak mampu ditambah sehingga mereka dapat meneruskan sekolah yang lebih tinggi.
 - 4) Perlunya meningkatkan kegiatan pembinaan dan pelatihan MTQ, terutama peserta dari siswa-siswi sekolah dan santri pondok pesantren;
 - 5) Perlunya penambahan personil/pegawai;
 - 6) Pengembangan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan, dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembangan BUMDesa; melaksanakan pembinaan pemberian dukungan bantuan, fasilitasi pendataan, pengembangan dan pemberdayaan Bumdes dan meningkatkan promosi usaha melalui pameran usaha dan pemberian bantuan stimulan; Melaksanakan koordinasi fasilitasi, pembinaan, bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro; Melaksanakan pendataan, pembinaan, pemberian dukungan bantuan terhadap lembaga ekonomi desa;

- 7) Melaksanakan sosialisasi bimbingan teknis monitoring dan evaluasi serta bantuan stimulan;
- 8) Melaksanakan pembinaan Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi;
- 9) Melaksanakan koordinasi dan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- 10) Melaksanakan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat bidang pengembangan sarana dan prasarana;
- 11) Melaksanakan pembinaan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan penggalan, pemanfaatan sumber daya dan teknologi tepat guna di perdesaan;
- 12) Melaksanakan peningkatan kapasitas desa dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan masyarakat desa lainnya dalam proses pengembangan profil desa/kelurahan dan mendayagunakan sistem informasi desa;
- 13) Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinan;
- 14) Peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan;
- 15) Melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai teknis, mekanisme dan proses pelaksanaan pembangunan desa, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi; Meningkatkan kualitas perencanaan di desa melalui fasilitasi bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat desa, monitoring dan evaluasi kerjasama antar desa, pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan.

- 16) Menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.
 - 17) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan KPMD melalui Sosialisasi/ bimbingan teknis.
 - 18) Monitoring dan evaluasi ke tingkat desa untuk mengecek kinerja Pemdes dan KPMD.
 - 19) Perlunya Penambahan kebutuhan PNS untuk mendukung kinerja Dinas.
 - 20) Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga pengecatan dan pemeliharaan Gedung Olah Raga (GOR) simpang lima ,Pemeliharaan Stadion Krida Bhakti Purwodadi.
 - 21) Perlunya adanya pembinaan yang berjenjang dari tingkat SD sampai SMA dengan sering mengadakan perlombaan dan pertandingan sehingga akan menciptakan atlet-atlet yang handal.
 - 22) Perlunya mengadakan diklat pada pemuda yang mengacu pada keterampilan untuk hidup (life skill) agar pemuda bisa berdikari sendiri.
 - 23) Meningkatkan anggaran untuk biaya operasional peningkatan pembinaan terhadap calon Akseptor KB Pria.
 - 24) Meningkatkan anggaran untuk biaya operasional peningkatan pembinaan, pendampingan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- e. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja, adalah sebagai berikut :
- 1) Perlu ada komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai kuota penempatan dan lokasi penempatan transmigrasi.
 - 2) Pemberian gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai lokasi transmigrasi, sehingga masyarakat mengerti dan merasa tidak dirugikan.

- f. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik, adalah sebagai berikut :
- 1) Mengusulkan kepada Bupati dalam hal pengisian CPNS mendatang agar dapat dipenuhi kebutuhan pegawai khususnya untuk tenaga operasional pemeriksa/pejabat fungsional, dengan latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi, Hukum, Teknik, dan Apoteker.
 - 2) Mengusulkan kepada Bupati agar dalam perencanaan anggaran di tahun mendatang Inspektorat diberikan tambahan plafon anggaran.
 - 3) Penambahan dana pemeliharaan jaringan dan infrastruktur komunikasi dan informatika, serta peningkatan pengelolaan website di OPD.
 - 4) Meningkatkan kualitas sumber daya informasi dan komunikasi.
 - 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana informatika.
 - 6) Peningkatan peralatan pendukung dokumentasi kegiatan kedinasan unsur pimpinan daerah.
 - 7) Diusulkan peralatan dokumentasi (lensa foto tele; kamera shooting)
- g. Solusi yang harus dilakukan dalam Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
 - 2) Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana penunjang Laboratorium Lingkungan Hidup.
 - 3) Mengupdet data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - 4) Menambah Aparatur dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 5) Memberikan sosialisasi kepada Perusahaan / usahawan tentang peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- 6) Membuat Peraturan Daerah.
 - 7) Peningkatan kinerja semaksimal mungkin.
 - 8) Diusulkan menambah karyawan secepatnya
 - 9) Perlunya meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan kapasitas personil PPNS, serta meningkatkan koordinasi antar OPD terkait kurang maksimal.
 - 10) Perlunya pembinaan dan masukan pendapat di antara komponen masyarakat, agar dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing.
 - 11) Perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi yang intensif melalui pertemuan dengan para PKL dan paguyuban PKL dalam rangka penataan serta penertiban kepada para PKL yang melanggar Preda.
 - 12) Perlunya diadakan kajian ulang tentang pelaksanaan penambangan galian C yang selama ini masih berlangsung.
 - 13) Penegakan perda melalui pelaksanaan Yustisi yang melibatkan OPD serta instansi terkait.
 - 14) Perlu difasilitasinya sosialisasi serta komunikasi antara pihak pengusaha dan warga Masyarakat dalam penyelesaian permasalahan keberadaan Hotel dan rumah kost yang berada ditengah lingkungan warga masyarakat yang dikhawatirkan akan mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
- h. Solusi yang harus dilakukan dalam meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan kreatifitas pelaku seni yang berkembang di masyarakat Grobogan dengan sering menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku seni tradisioanal.
 - 2) Mengenalkan seni budaya asli Grobogan dengan menyelenggarakan parade seni supaya masyarakat mengenal seni budaya lokal.

- 3) Menggali lagi upacara tradisional yang ada di kabupaten Grobogan dengan cara mendokumentasikan upacara tradisional yang ada di Kabupaten Grobogan.
 - 4) Diusulkan program tentang pembuatan Film dan pembuatan sekrenario film di sekolah dan masyarakat umum.
 - 5) Memberikan bantuan alat kesenian untuk organisasi tradisional supaya tidak hilang.
 - 6) Memberikan sosialisasi dan membuat perda tentang penemuan benda-benda cagar budaya supaya di inventarisasi dan dibuatka musium supaya jadi daya tarik masyarakat Grobogan.
 - 7) Mengedepankan Skala prioritas.
- i. Solusi yang harus diambil dalam meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan anggaran untuk biaya operasional peningkatan pembinaan terhadap Isu Gender terhadap Stakholders dan masyarakat.
 - 2) Menganggarkan untuk kegiatan data pilah gender disetiap SKPD

Secara umum, capaian kinerja Sasaran Strategis tahun 2017 tercapai dengan **kualifikasi Sangat Baik (skor = 141,88%)** naik 31,50% dibanding capaian kinerja pada Tahun 2016 (skor = 110,38%). Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Grobogan tahun pertama juga dapat dilihat dari pencapaian target beberapa indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Grobogan.

Prestasi/penghargaan yang diperoleh Kabupaten Grobogan selama tahun 2017, adalah sebagai berikut :



- a. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016.
- b. Penghargaan Nasional sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2017.
- c. Penghargaan Nasional sebagai Kabupaten Layak Anak kategori “Pratama”.
- d. Penghargaan Nasional dari Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2017 Kategori Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.
- e. Penghargaan Nasional Akreditasi Rumah Sakit “Paripurna” oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
- f. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional a.n. SMA N 1 Toroh.
- g. Peringkat I Nasional Musabaqoh Qiroatul Kutub a.n. Hadi Nashiri Zaenal Muttaqin.
- h. Peringkat I Nasional Lomba Kelompok Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan a.n. Kelompok Tani “Ngudi Rejeki I” Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi.
- i. Peringkat I Nasional Kontes Produk Unggulan Hortikultura Kategori Bawang Merah a.n. Tri Joko Purnomo KTNA Kabupaten Grobogan.
- j. Peringkat II Nasional Lomba Web Kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Lingkup Pertanian a.n. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.
- k. Peringkat III Nasional Kontes Produk Unggulan Hortikultura Kategori Pisang Meja a.n. Dudi Sulistianto KTNA Kabupaten Grobogan.
- l. Peringkat IV Nasional Lomba Web Kategori SKPD Kabupaten/ Kota Lingkup Pertanian a.n Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.

Dari uraian diatas, secara makro Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 telah menyelenggarakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya, meliputi urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sehingga dapat berjalan secara baik dan optimal.

Disadari bahwa pelaksanaan pembangunan saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyelesaikan semua persoalan secara menyeluruh. Hal ini bukan karena tidak mau atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, tetapi semata-mata karena keterbatasan sumber daya yang ada dan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Oleh karena itu, kepada semua pihak diharap dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Semoga laporan kinerja ini, dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta kepuasan masyarakat di Kabupaten Grobogan untuk tahun berikutnya.

Purwodadi, Maret 2018

BUPATI GROBOGAN,



SUMARNI, SH, MM